

**ANALISIS REAKSI PASAR MODAL
TERHADAP KEBIJAKAN AMNESTI PAJAK
(Studi Kasus pada Saham-Saham Syariah
yang Masuk Daftar JII Periode Juni-November 2016)**



Oleh:

DWI RAHAYU
NIM: 1320310017

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Keuangan & Perbankan Syariah

YOGYAKARTA

2016

ABSTRAK

Berbagai kondisi ekonomi dapat mempengaruhi investasi di pasar modal. Investor perlu kepastian informasi saat ingin melakukan transaksi di pasar modal. Kebijakan amnesti pajak diasumsikan memiliki kandungan informasi bagi dunia investasi, sehingga penelitian ini ingin melihat apakah dengan adanya peristiwa amnesti pajak dapat memberikan *abnormal return* (AR) dan peningkatan *trading volume activity* (TVA) pada saham-saham syariah yang masuk daftar JII periode Juni-November 2016.

Penelitian ini menggunakan metode analisis *event study*. Langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan periode penelitian. Periode penelitian yang digunakan adalah 10 hari bursa yaitu t-5 hingga t+5 sejak kebijakan amnesti pajak diberlakukan tanggal 18 Juli 2016. Penelitian ini menggunakan sampel 30 perusahaan yang masuk daftar JII yang terdistribusi normal dengan uji *one-kolomogorov smirnov*.

Pengujian tidak dilakukan pada setiap saham namun diuji secara simultan dengan menghitung *average abnormal return* (AAR), *cumulative average abnormal return* (CAAR) dan *average trading volume activity* (ATVA). Hal yang mengejutkan terjadi dalam hasil penelitian, Pengujian statistik menggunakan program SPSS 23 dengan uji *one sampel t-test* menunjukkan nilai tidak signifikan yang artinya kebijakan amnesti pajak tidak memberikan *abnormal return* pada saham-saham syariah yang masuk daftar JII. Uji beda juga dilakukan untuk melihat perbedaan AAR, CAAR dan ATVA pada sebelum dan sesudah amnesti pajak. Hasil uji *paired sampel t-test* menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan reaksi pasar terhadap amnesti pajak.

Beberapa alasan dapat menjelaskan hasil penelitian ini seperti informasi amnesti pajak yang tersedia secara luas sehingga cepat diterima oleh investor, informasi sudah diprediksi oleh pasar, investor mampu menginterpretasikan informasi dengan baik, pemerintah menyiapkan *gate way* selain pasar modal untuk wadah investasi, dan terakhir berdasarkan hasil wawancara dengan kepala representatif IDX di Yogyakarta bahwa saat ini investor lebih tertarik berinvestasi di saham perbankan.

Kata kunci : amnesti pajak, *abnormal return*, *trading volume activity*, reaksi pasar modal.

ABSTRACT

Many kinds of economic factors affect the stock market. Every investor should be aware of accurate information before getting involved in market investing. Tax amnesty are assumed to contain information for the investment world, so this study wanted to see if tax amnesty may provide Abnormal Return (AR) and an increase in Trading Volume Activity (TVA) on JII stocks list period June to November 2016.

This research using event study analysis. The first step taken determining period of research. The research period is 10 days exchange during t-5 till t-5. This research used 30 samples of companies Jakarta Islamic Index which have normal distribution with one-kolomogorov Smirnov test.

The test is not performed on every stock but tested simultaneously by calculating the Average Abnormal Return (AAR), Cumulative Average Abnormal Return (CAAR) and Average Trading Volume Activity (ATVA). The surprising thing happened in the research results, statistical tests using SPSS 23 with one test sample t-test showed no significant value, which means a tax amnesty policy does not provide abnormal return on JII stock list. Different test was also conducted to see the difference in AAR, CAAR and ATVA before and after the tax amnesty. The test results paired samples t-test showed no significant differences in market reaction to a tax amnesty.

Several reasons may explain these results as information tax amnesty widely available so quickly accepted by the investor, the information has been predicted by the market, investors are able to interpret the information properly, the government set up a gate way other than capital markets for container investment, and the latter based on interviews with IDX chief representative in Yogyakarta that this time investors are more interested in investing in banking stocks.

Key words : *tax amnesty, abnormal return, trading volume activity, capital market react.*

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DWI RAHAYU**

NIM : 1320310017

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 29 September 2016

Saya yang menyatakan,



DWI RAHAYU

NIM: 1320310017

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DWI RAHAYU**

NIM : 1320310017

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 September 2016

Saya yang menyatakan,



DWI RAHAYU

NIM: 1320310017

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : ANALISIS REAKSI PASAR MODAL TERHADAP
KEBIJAKAN AMNESTI PAJAK (Studi Kasus Pada Saham-
Saham Syariah yang Masuk Daftar JII Periode Juni-November
2016)

Nama : DWI RAHAYU
NIM : 1320310017
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam (HI)
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah (KPS)
Tanggal Ujian : 7 NOVEMBER 2016

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi
(M.E.).

Yogyakarta, 7 November 2016

Direktur,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : ANALISIS REAKSI PASAR MODAL
TERHADAP KEBIJAKAN AMNESTI PAJAK
(Studi Kasus pada Saham-Saham Syariah yang
Masuk Daftar JII Periode Juni-November 2016)

Nama : Dwi Rahayu, S.E.I.

NIM : 1320310017

Prodi : Hukum Islam

Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosyah

Ketua : Dr. Roma Ulin Nuha, M.Hum.



Pembimbing/Penguji : Dr. Ibnu Qizam, M.Si. Akt.



Penguji : Dr. Misnen Ardiansyah. M.Si. Akt.



Diuji di Yogyakarta pada tanggal 7 November 2016

Waktu : 09.00 – 10.00 WIB

Hasil/Nilai : A-/89

Predikat : Memuaskan/Sangat Memuaskan/Cumlaude*

*coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dir. Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**ANALISIS REAKSI PASAR MODAL
TERHADAP KEBIJAKAN AMNESTI PAJAK**

Yang ditulis oleh:

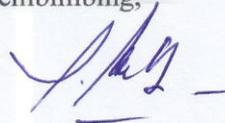
Nama : **Dwi Rahayu, S.E.I.**
NIM : 1320310017
Jenjang : Magister (S2)
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Ekonomi Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 07 Oktober 2016

Pembimbing,



Dr. Ibnu Qizam, S.E., Akt., M.Si.

NIP: 19680102 199403 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	y	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' marbutah*

Semua *ta' marbutah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
عَلَّة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karamah al-auliya'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----◌-----	Fathah	ditulis	<i>a</i>
-----◌-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----◌-----	Dammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>zukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>a</i>
جاهليّة	ditulis	<i>jahiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>a</i>
تَنَسَى	ditulis	<i>tansa</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>i</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karim</i>
4. D{ammah + wawu mati	ditulis	<i>u</i>
فُرُوض	ditulis	<i>furud</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أُعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْشُكْرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya

ذوالفروض	ditulis	<i>zawi al-furud</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

MOTTO

“aku adalah ikan air tawar yang berusaha memahami lautan...”

Nugroho, F. A.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, penguasa langit dan bumi, pencipta seluruh makhluk, maha memberi rejeki dan maha besar atas segala rahmat-Nya. Shalawat serta Salam senantiasa tetap tercurah bagi Nabi junjungan semesta alam Muhammad SAW, seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Puji syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT berkat Taufik dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan upaya sebaik mungkin serta penuh semangat dan perjuangan, sehingga tugas tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penelitian ini merupakan tugas akhir pada Program Studi Hukum Islam, konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat untuk memperoleh gelar strata dua. Dalam upaya penyelesaian tesis ini terdapat beberapa rintangan yang harus dilewati. Untuk itu, penyusun dengan ikhlas ingin mengucapkan terima kasih kepada :

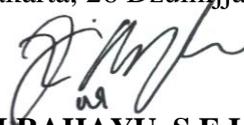
1. Prof. Dr. K.H. Yudian Wahyudi M.A. Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D selaku Dekan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Ibnu Qizam, S.E., Akt., M.Si. selaku dosen pembimbing tesis yang dengan kesabarannya telah membimbing saya dalam penyelesaian tesis ini.
4. Dr. Misnen Ardiyansyah, S.E., Akt., M.Si. dan Dr. Roma Ulin Nuha, M.Hum. selaku dosen penguji tesis, terimakasih atas masukan dan bimbingannya demi perbaikan tesis ini.
5. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Islam Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu, pengetahuan dan wawasan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
6. Ibu Supriyati adalah Ibuku tercinta yang dengan sabar dan ikhlas bekerja mengeluarkan peluhnya untuk dapat menyekolahkan anaknya setinggi mungkin dan tidak pernah lelah mendoakan dan memotivasi anaknya untuk

menjadi orang yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, agama, bangsa dan negara.

7. Ibu Aisyah dan Bapak Supriyo selaku mertua, terimakasih atas motivasi dan doanya.
8. Suamiku tercinta Faiz Ahmad Nugroho dan Putriku tersayang Layung Rih Sekarrahina terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang senantiasa dicurahkan.
9. Adikku Tri Nur Hidayah dan mbakku Eka Mei Sari Dewi, terimakasih atas motivasi dan doanya.
10. Teman-teman KPS Reguler mba Asmi, mba Roffi, Babe, mas Ari, Sari, Loni, Hamzah, Muksal, Suri, Nila, Iqbal, terimakasih atas bantuan, dukungan dan doanya.
11. Sahabat-sahabat yang memberikan dukungan Mba Asmi, Mba Riska, Mba Resti, Mba Hesti dan lainnya yang telah memberikan dorongan dan doanya.
12. Seluruh pegawai dan staff Tata Usaha Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga atas pelayanannya, semoga akan selalu lebih baik.
13. Rekan-rekan PT. Cakrawala Metrik, Pak Ilham, Ibu Septi, Jejen, mba Erna, mba Rea, mba Eva, mba Alfi, mas Dwi, mas Handa, mas Dadang, mas Muklis, Pak Yanto, Pak Wayan dll, terimakasih atas motivasi dan doanya.
14. Semua pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung turut membantu dalam penyusunan tesis ini. Semoga amal baik mereka semua mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT, Aamiin.

Penulisan tesis ini tidak luput dari kekurangan, karena penulis menyadari masih memiliki banyak keterbatasan ilmu, kemampuan dan kesempatan. Namun demikian, besar harapan agar tesis ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan.

Yogyakarta, 26 Dzulhijjah 1437 H



(DWI RAHAYU, S.E.I., M.E.)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	vii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
HALAMAN MOTO	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Landasan Teori	15
1. Teori Efisiensi Pasar.....	15
2. <i>Sygnalling Theory</i>	19
F. Hipotesis.....	20
G. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Populasi dan Sampel	29
3. Jenis dan Sumber Data	30
4. Definisi Operasional Variabel.....	31

a. Amnesti Pajak	31
b. <i>Abnormal Return</i>	33
c. <i>Trading Volume Activity (TVA)</i>	35
5. Periode Pengamatan	36
6. Teknik Analisis Data	37
a. Analisis Deskripsi Data Penelitian	37
b. Analisis Statistik Desriptif.....	37
c. Uji Normalitas	37
d. Uji Hipotesis.....	38
H. Sistematika Pembahasan	44
BAB II AMNESTI PAJAK & PASAR MODAL DI INDONESIA ..	46
A. Amnesti Pajak	46
B. Pasar Modal Syariah	51
1. Sejarah dan Pengertian Pasar Modal Syariah.....	51
2. Pasar Modal Syariah di Indonesia.....	54
C. <i>Jakarta Islamic Index (JII)</i>	55
D. Saham Syariah.....	57
1. Jenis-jenis Saham	59
2. Syarat Investasi Saham Syariah	60
3. Kriteria Pemilihan Saham yang Memenuhi Prinsip-prinsip Syariah.....	62
4. Pihak-pihak yang terlibat dalam saham syariah.....	63
5. Mekanisme Saham Syariah	65
6. Perbedaan Saham Syariah dan Saham Konvensional	66
7. Fatwa Saham Syariah di Indonesia	66
E. Harga Saham	68
F. Reaksi Pasar terhadap Kebijakan Amnesti Pajak.....	71
G. Return Saham	72
H. <i>Abnormal Return (AR)</i>	74
I. <i>Trading Volume Activity (TVA)</i>	78
BAB III ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	80

A. Analisis Data	80
1. Deskripsi Sampel.....	80
2. Deskripsi Data Penelitian	81
3. Pengujian Statistik Deskriptif	84
4. Pengujian Normalitas	85
5. Pengujian Hipotesis.....	88
a. Pengujian Hipotesis Pertama.....	88
b. Pengujian Hipotesis Kedua.....	90
c. Pengujian Hipotesis Ketiga	93
6. Hasil Wawancara Bursa Efek Indonesia	94
B. Pembahasan.....	97
1. Pembahasan Hipotesis Pertama.....	99
2. Pembahasan Hipotesis Kedua	103
3. Pembahasan Hipotesis Ketiga	104
BAB IV PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Keterbatasan Penelitian	107
C. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tarif Uang Tebusan, 49.
Tabel 2	Lembaga Penampung Dana Repatriasi, 50.
Tabel 3	Daftar Saham yang Masuk dalam Perhitungan Jakarta Islamic Index (JII) Periode Juni s.d. November 2016, 80.
Tabel 4	Hasil Uji Statistik Deskriptif, 85.
Tabel 5	Pengujian Normalitas Data <i>One-Sampel Kolomogorov-Smirnov Test</i> , 86.
Tabel 6	Uji beda <i>abnormal return</i> selama periode peristiswa kebijakan Amnesti Pajak, 89.
Tabel 7	Uji beda <i>abnormal return</i> saham selama kebijakan Amnesti Pajak, 90.
Tabel 8	Uji beda abnormal return saham pada rata-rata 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah kebijakan Amnesti Pajak, 91.
Tabel 9	Uji beda <i>Paired Sampel t-test Cumulasi Average Abnormal Return</i> saham pada rata-rata 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah kebijakan Amnesti Pajak, 92.
Tabel 10	Uji beda Trading Volume Activity saham pada rata-rata 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah kebijakan Amnesti Pajak, 93.

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Kerangka Berifkir, 27.
- Gambar 2 Periode Pengamatan, 36.
- Gambar 3 Perubahan *Return* dan *Market Return* sebelum dan sesudah kebijakan Amnesti Pajak, 82.
- Gambar 4 Perubahan *Abnormal Return* sebelum dan sesudah kebijakan Amnesti Pajak, 83.
- Gambar 5 Perubahan *Trading Volume Activity* sebelum dan sesudah kebijakan Amnesti Pajak, 84.
- Gambar 6 *Average Abnormal Return (AAR)* dan *Cummulative AAR (CAAR)* sebelum dan sesudah kebijakan Amnesti Pajak, 88.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Perhitungan Excel, 1.
- Lampiran 2 Hasil Perhitungan SPSS, 10.
- Lampiran 3 Daftar Penelitian Terdahulu, 14.
- Lampiran 4 Hasil Wawancara BEI, 17.
- Lampiran 5 Daftar JII periode Juni s.d. November 2016, 19.
- Lampiran 6 UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, 22.
- Lampiran 7 FAQ Amnesti Pajak, 49.
- Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup, 63.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu instrumen ekonomi, pasar modal tidak lepas dari berbagai pengaruh lingkungan yang mencakup faktor ekonomi baik yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan serta faktor non-ekonomi seperti faktor sosial, politik dan faktor lainnya yang mengganggu stabilitas nasional suatu negara. Peristiwa yang mempengaruhi pasar modal pada prinsipnya mengandung suatu informasi. Kandungan informasi yang diserap oleh pasar akan digunakan oleh para investor untuk menentukan keputusan investasinya, sehingga investor akan berupaya mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat. Menurut Jogiyanto, jika pasar bereaksi dengan cepat dan akurat untuk mencapai harga keseimbangan baru yang sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia, maka kondisi pasar seperti itu disebut dengan pasar yang efisien.¹

Kemampuan pasar yang efisien dalam menerima informasi dijelaskan juga dalam *signalling theory*. Teori ini menjelaskan bahwa sinyal-sinyal yang timbul dari informasi baik yang berasal dari eksternal perusahaan (kebijakan pemerintah, inflasi, bencana alam dan lain-lain) maupun internal perusahaan (kebijakan manajemen perusahaan) secara langsung akan berpengaruh pada pergerakan harga dari perusahaan

¹ Jogiyanto HM, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi kedua (Yogyakarta: BPFE, 2000), 351.

terkait.² Di dalam pasar yang efisien, investor dituntut untuk mengetahui peristiwa-peristiwa ekonomi maupun non-ekonomi yang meliputi peristiwa politik, sosial, dan budaya yang kemudian informasi tersebut dianalisis untuk menentukan keputusan investasi.

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) merupakan instrumen untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Namun, hingga tahun 2015, Wajib Pajak yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak hanya mencapai 30.044.103, yang terdiri dari 2.472.632 Wajib Pajak Badan, 5.239.385 Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan, dan 22.332.086 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan.³ Hal ini cukup memprihatinkan karena hanya sekitar 29,4% dari total jumlah Orang Pribadi Pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang terdaftar sebagai wajib pajak. Dalam rangka mereformasi administrasi perpajakan dan kebutuhan belanja negara yang mendesak,

² Upal Bhattacharya dan Amy Dittmar, "Costless Versus Costly Signalling: Theory and Evidence from Share Repurchases," *paper of seminar participants at Indiana University*, 2001.

³ Refleksi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, www.pajak.go.id, diakses tanggal 22 Agustus 2016.

pemerintah mengeluarkan Kebijakan amnesti pajak yang tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pajak Pengampunan yang disahkan tanggal 1 Juli 2016 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 18 Juli 2016.

Fenomena problem rendahnya penerimaan negara dari aspek pajak yang ada di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia, tidak sekadar dipicu oleh rendahnya rasio jumlah wajib pajak dengan jumlah penduduk, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor dominan lainnya seperti tingginya praktek penghindaran pajak (*tax avoidance*), pelarian pajak (*tax evasion*), moralitas pajak (*tax morality*), kesadaran pajak (*tax compliance*), kerumitan administrasi (*administration complexity*), kepercayaan pada institusi (*institutional trust*), kemampuan untuk menerapkan (*capacity to implement*).⁴ Ditambah dengan fenomena bahwa Indonesia didominasi oleh umat muslim yang memiliki kewajiban ganda yaitu membayar zakat dan pajak sehingga membuat warga negara Indonesia semakin enggan membayar pajak.⁵

Islam adalah negara yang *syamil* dan *mutakamil* memiliki sistem yang terpadu yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk ekonomi dan politik. Dalam upaya mensejahterakan rakyat, Islam juga mengatur pos-pos penerimaan yang berhak diterima oleh negara. Dalam surat at-Taubah ayat 20 Allah S.W.T berfirman:

⁴ Bintoro Wardiyanto, "Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty): Perspektif Kerangka Kerja Implementasi Sunset Policy berdasarkan UU No 28 tahun 2007," *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Th. XXI. No. 4, Universitas Airlangga (Oktober–Desember 2008), 328–335.

⁵ Nurul Huda, dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islami*, 148.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي

الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ مَطْرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.

Ayat tersebut menjelaskan tentang fungsi sosial yang dijalankan secara Islami. Dalam konteks investasi di pasar modal, seorang investor muslim harus berbekal dan mematuhi pada norma dan etika investasi yang sesuai dengan prinsip syariah atau dengan kata lain tidak melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Hal tersebut dimaksudkan agar investasi yang dilakukan di pasar modal mendapatkan manfaat dan keberkahan. Investasi dalam persepektif Islam hanya dapat dilakukan pada instrumen yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak mengandung riba. Investasi juga hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak (emiten) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Investor muslim berkaitan dengan harta dan penghasilan terdapat kewajiban berupa zakat bagi yang telah memenuhi syarat. Sebagai warga negara Indonesia Investor muslim juga memiliki kewajiban pajak bagi yang telah memenuhi syarat, karena telah dibuat undang-undang yang mewajibkan hal tersebut. Menyikapi kewajiban pajak berdasarkan undang-

undang ini, terdapat beberapa pendapat dikalangan umat Islam dari yang pro maupun yang kontra karena telah ada kewajiban zakat ataupun pengelolaan yang belum amanah. Berdasarkan sejarah hukum Islam, pada zaman Nabi Muhammad terdapat kewajiban *kharaj* dan *jizyah* yang dipungut dari non-muslim, dan *'usyr* yang dipungut dari pedagang dari luar wilayah. Umat Islam tetap dengan kewajiban zakat. *Nawa'ib* dipungut dari umat Islam yang kaya dalam kondisi darurat. Kewajiban muslim dan non-muslim ini diteruskan oleh *Khulafa' Rosyidin*. Dalam perkembangannya ahli fiqih dan pemikir ekonomi Islam memberikan pertimbangan, negara dapat memungut pajak dengan syarat-syarat tertentu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak ada alternatif sumber penerimaan lain.⁶

Kebijakan amnesti pajak pertama kali diberlakukan di Indonesia pada tahun 1984, tetapi pelaksanaannya belum efektif karena tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh dan kurangnya respon dari wajib pajak.⁷ Selanjutnya pada tahun 2008, pemerintah menerbitkan aturan *sunset policy*.⁸ Rakhmindyarto meneliti *sunset policy* yang diberlakukan pada tahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan *sunset policy* telah berhasil menambah jumlah WP baru dan meningkatkan kepatuhan pembayar pajak. Penelitian tersebut juga

⁶ Nurul Huda, dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islami*, 133.

⁷ Reni Indah, "Apa Sih Amnesti pajak?," Kompasiana, www.kompasiana.com, diakses tanggal 10 Agustus 2016.

⁸ Bintoro Wardiyanto, "Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty): Perspektif Kerangka Kerja Implementasi Sunset Policy mendasarkan UU No 28 tahun 2007," *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Th. XXI. No. 4, Universitas Airlangga (Oktober–Desember 2008), 328–335.

menemukan kekurangan dalam implementasi *sunset policy*, yaitu pertama kurangnya perencanaan program dimana pemerintah tidak membuat estimasi biaya program dan estimasi pendapatan. Pemerintah mengeluarkan biaya operasional yang tidak sebanding dengan ekspektasi yang tinggi atas pendapatan yang akan diterima pemerintah. Publikasi yang kurang juga membuat *sunset policy* pada tahun 2008 tidak berjalan optimal.⁹

Sejarah amnesti pajak di Indonesia mengajarkan pemerintah untuk bersiap-siap mengantisipasi permasalahan perpajakan yang sangat kompleks. Untuk itu seluruh wajib pajak diharapkan dapat mengikuti kebijakan ini dengan mendeklarasi atau merepatriasi asetnya kemudian diinvestasikan diberbagai instrumen investasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Terutama bagi investor muslim, yang harus menjalankan tuntunan agama Islam, yaitu menjadi warga negara yang turut mensukseskan program pemerintah, supaya dapat terwujud perekonomian yang adil dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

Dari penjelasan di atas dapat diasumsikan bahwa kebijakan amnesti pajak seharusnya memberikan sentimen positif (*good news*) di dunia investasi khususnya di pasar modal syariah Indonesia. Untuk melihat bagaimana reaksi harga saham-saham syariah terhadap kebijakan amnesti pajak adalah dengan melihat ada tidaknya *abnormal return* dan

⁹ Rakhmindyarto, "Evaluating The Sunset Policy in Indonesia," *International Review of Social Sciences and Humanities*, Vol. 2, No. 1 (2011), 198-214.

trading volume activity. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Chatziantoniou yang menemukan adanya *abnormal return* pada pasar saham di Jerman, Inggris dan AS setelah adanya kebijakan fiskal dan kebijakan moneter di negara-negara tersebut. Bamber dan Cheon juga menemukan adanya peningkatan *trading volume activity*. Penelitian ini akan menguji apakah kebijakan amnesti pajak dapat memberikan *abnormal return* dan peningkatan *trading volume activity* pada pasar modal di Indonesia. Maka dari itu judul penelitian ini adalah:

“ANALISIS REAKSI PASAR MODAL TERHADAP KEBIJAKAN AMNESTI PAJAK (Studi Kasus pada Saham-Saham Syariah yang Masuk Daftar JII Periode Juni-November 2016).”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kebijakan amnesti pajak memberikan *abnormal return* pada saham-saham syariah yang masuk daftar JII periode Juni-November tahun 2016?
2. Apakah terdapat perbedaan *abnormal return* pada saham-saham syariah yang masuk daftar JII periode Juni-November tahun 2016 sebelum dan sesudah kebijakan amnesti pajak?
3. Apakah terdapat perbedaan *trading volume activity* pada saham-saham syariah yang masuk daftar JII periode Juni-November tahun 2016 sebelum dan sesudah kebijakan amnesti pajak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah kebijakan amnesti pajak memberikan *abnormal return* pada saham-saham syariah yang masuk daftar JII periode Juni-November tahun 2016.
- b. Untuk mengetahui Apakah terdapat perbedaan *abnormal return* pada saham-saham syariah yang masuk daftar JII periode Juni-November tahun 2016 sebelum dan sesudah kebijakan amnesti pajak.
- c. Untuk mengetahui Apakah terdapat perbedaan *trading volume activity* pada saham-saham syariah yang masuk daftar JII periode Juni-November tahun 2016 sebelum dan sesudah kebijakan amnesti pajak.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a. Bagi investor dan analis keuangan, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perhitungan untuk mendapatkan investasi yang efektif dan efisien.
- b. Bagi emiten, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan keputusan yang berkaitan dengan harga saham.
- c. Bagi Penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh pihak – pihak lain yang berkepentingan baik

digunakan sebagai referensi maupun sebagai bahan teori bagi penelitian selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Sebagai rujukan dan pembanding penelitian ini maka penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Pertama penelitian yang berhubungan dengan amnesti pajak untuk melihat apakah kebijakan ini mengandung nilai informasi yang dapat mempengaruhi harga-harga saham syariah. Kedua adalah penelitian tentang reaksi pasar modal terhadap peristiwa ekonomi dan non-ekonomi.

Penelitian tentang kebijakan amnesti pajak, pernah dilakukan oleh Borgne, ia meneliti hubungan kebijakan amnesti pajak terhadap politik di negara-negara bagian Amerika Serikat sejak tahun 1982-2004. Faktor-faktor yang digunakan sebagai penentu munculnya kebijakan amnesti pajak adalah pemilihan Gubernur, *Governor defeated*, total pajak, *Growth* dan *Growth state debt*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 50% kemungkinan munculnya kebijakan amnesti pajak saat adanya peristiwa pemilu. Ia juga menyebutkan bukan hanya politik yang menjadi faktor kebijakan amnesti pajak melainkan juga faktor ekonomi yaitu sebagai sumber peningkatan pendapatan negara.¹⁰

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nar yang ingin menghubungkan aspek psikologi dapat menjelaskan suatu perilaku

¹⁰ Eric Le Borgne, "Economic and Political Determinants of Tax Amnesties oin The us States." *IMF Working Paper, International Monetary Fund* (2006), 1-15.

ekonomi. Penelitian ini membandingkan populasi wajib pajak di negara-negara yang tergabung di *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). Nar membuktikan bahwa aspek psikologis meskipun nilainya kecil mampu mempengaruhi perilaku ekonomi. Karena masyarakat pada umumnya enggan membayar pajak, dengan berbagai alasan seperti kekecewaan terhadap pemerintah, tidak adanya sistem perpajakan yang adil, transfer ilegal oleh oknum petugas pajak dll, inilah yang menjadikan perasaan negatif secara psikologis terhadap pemerintah. Dengan adanya interaksi sosial manusia cenderung menyesuaikan perilaku mereka sendiri sesuai dengan perilaku kelompok, ini yang kemudian menjadi salah satu faktor munculnya kebijakan amnesti pajak.¹¹

Bayer menyajikan model teoritis dan bukti empiris untuk menjelaskan terjadinya amnesti pajak. Ia menemukan bahwa adanya peningkatan kepatuhan pajak setelah kebijakan amnesti pajak di Amerika Serikat tahun 1981 dan tahun 2011, serta bertambahnya penerimaan negara secara singkat. Selain itu pemerintah juga harus membuat undang-undang yang kredibel, untuk mengantisipasi adanya tekanan peningkatan anggaran di masa depan setelah kebijakan ini diberlakukan.¹²

Beberapa penelitian di atas berkaitan dengan kebijakan amnesti pajak. Sedangkan penelitian ini ingin melihat bagaimana reaksi pasar

¹¹ Mehmet Nar, "The Effect of Behavioral Economics on Tax Amnesty," *International Journal of Economics and Financial Issues*, 5(2) (2015), 580-589.

¹² Ralp-C Bayer, Harald Oberhofer dan Hannes Winner, "The Occurrence of Tax Amnesties: Theory and Evidence," *Working Papers in Economics and Finance* (Juni 2014), 1-42.

terhadap suatu peristiwa. Beberapa penelitian tentang reaksi pasar akibat suatu peristiwa telah banyak dilakukan. Banyak peristiwa mampu mempengaruhi harga saham. Peristiwa tersebut dapat disebabkan oleh kebijakan perusahaan, kebijakan pemerintah dan isu-isu politik pemerintahan selama suatu periode tertentu.

Penelitian tentang reaksi pasar dilakukan oleh Bamber dan Cheon dengan judul “*Differential price and volume reactions to accounting earnings announcements.*” Penelitian ini menemukan adanya reaksi pasar sebagai akibat dari suatu peristiwa. Bamber menemukan pertama adanya tingkat penjualan yang tinggi namun dengan perubahan harga saham yang rendah, kedua adanya perubahan harga saham yang tinggi namun volume penjualan yang rendah.¹³

Sedangkan penelitian tentang analisis reaksi pasar akibat kebijakan pemerintah dilakukan oleh Setyawan dengan judul “Analisis Reaksi Pasar Modal Terhadap Kenaikan Harga BBM (Studi Kasus: Di Bursa Efek Jakarta Untuk Saham-Saham LQ 45).” Penelitian ini menemukan tidak adanya perbedaan *abnormal return* antara sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM, Namun terdapat perbedaan reaksi dimana sebelum kenaikan

¹³ L.S. Bamber dan Y. Cheon, “Differential price and volume reactions to accounting earnings announcements,” *The Accounting Review*, 70 (3) (1995), 417-41.

harga BBM cenderung reaksi negatif dan setelah kenaikan terdapat reaksi positif dari investor.¹⁴

Penelitian tentang analisis reaksi pasar akibat kebijakan pemerintah juga dilakukan Paultje yang meneliti reaksi pasar modal terhadap pengumuman kabinet baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar modal di Indonesia tidak efisien secara informasi, reaksi pasar sebelum dan sesudah peristiwa berbeda dengan beda *abnormal return* yang cukup signifikan, dan tidak ada aktifitas perdagangan yang menonjol dan berbeda, jadi volume aktivitas perdagangan tidak ada perubahan yang signifikan.¹⁵

Chatziantoniou, Duffy dan Filis meneliti tentang efek kebijakan moneter dan kebijakan fiskal terhadap kinerja pasar saham di Jerman, Inggris dan Amerika Serikat dengan menggunakan model VAR. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal baik secara masing-masing maupun bersama-sama dapat mempengaruhi pasar saham.¹⁶

Khan dkk. meneliti tentang dampak ekonomi makro seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, suku bunga, tingkat inflasi terhadap

¹⁴ St. Tri Adi Setyawan, "Analisis Reaksi Pasar Modal Terhadap Kenaikan Harga BBM (Studi Kasus: Di Bursa Efek Jakarta Untuk Saham-Saham LQ 45)," *Tesis tidak dipublikasikan*, Prodi Magister Manajemen Universitas Diponegoro Semarang (2006), 67.

¹⁵ Novi Paultje, "Reaksi Pasar Modal terhadap Pengumuman Kabinet Baru (Saham-saham LQ-45 sebagai Proksi)," *Tesis tidak dipublikasikan*, Magister Manajemen Universitas Diponegoro, Semarang (2001), 63.

¹⁶ Ioannis Chatziantoniou, David Duffy, dan Filis, "Stock market response to monetary and fiscal policy shocks: multi-country evidence." *Economic Modelling*, no. 30 (2013), 754-769.

kinerja pasar modal di Pakistan, menggunakan teknik analisis regresi dan korelasi Pearson dengan data bulanan. Penelitian ini menemukan bahwa indeks pasar saham Pakistan secara signifikan dipengaruhi oleh kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan inflasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat bunga dan pendapatan pemerintah memiliki hubungan negatif signifikan terhadap indeks pasar saham di Pakistan, sedangkan tingkat inflasi dan pengeluaran pemerintah memiliki hubungan positif signifikan dengan Indeks pasar saham di Pakistan.¹⁷

Somani dan Kern meneliti tentang efek dari berbagai kebijakan pemerintah terhadap kinerja pasar saham selama krisis keuangan global tahun 2007. Menggunakan data indeks dan *future level* sejak Juni 2007-Desember 2009 dari data Bloomberg. Timeline krisis keuangan didapat dari data Federal Reserve Board New York. Menggunakan teknik analisis regresi dengan tingkat indeks market ekspektasi sebagai variabel dependen dan variabel independen yaitu indeks volatilitas berjangka, *federal funds rate futures*, dan penciptaan atau penyesuaian swap. Hasil penelitian menunjukkan Harga indeks berjangka turun sebelas poin untuk setiap kenaikan dolar di VIX berjangka, yang mencerminkan ketidakpastian, dan merosot sebesar 82 poin untuk setiap kenaikan dolar di dana federal berjangka. Penciptaan atau penyesuaian swap mata uang juga signifikan pada tingkat 10% dengan estimasi parameter dari 39. Ketika dikoreksi

¹⁷ Waseem A Khan dkk, "Impact of Macroeconomics variable on the Stock Market index; A Study from Pakistan," *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, vol. 4, no. 2 (2014), 266.

untuk autokorelasi, juga signifikan pada tingkat 5% dengan estimasi parameter sedikit lebih tinggi dari 43. swap mata uang menstabilkan pasar valuta asing, membuat pasar saham relatif stabil. satu-satunya tindakan kebijakan yang secara signifikan mempengaruhi harga indeks berjangka adalah penciptaan atau penyesuaian swap. Penurunan suku bunga dana federal adalah cara paling praktis bagi pemerintah untuk meningkatkan harga saham.¹⁸

Handoyo dkk. meneliti tentang efek dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter terhadap harga saham di Bursa Efek Indonesia terutama pada harga saham sektor pertanian, pertambangan, manufaktur, dan indeks sektor keuangan dan harga minyak dunia sebagai variabel asing yang akan mempengaruhi ekonomi domestik. Penelitian ini menggunakan metode *algoritma Monte Carlo* untuk *Near-SVAR* model. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat respon positif harga saham terhadap kebijakan moneter baik agregat dan sektoral harga saham. Interaksi antara kebijakan fiskal dan pasar saham terdapat hubungan negatif di semua sektor. kebijakan fiskal dan kebijakan moneter tidak hanya dapat mempengaruhi harga saham secara individual, tetapi juga interaksi keduanya dapat mempengaruhi kinerja pasar saham di Indonesia.¹⁹

¹⁸ Samruddhi Somani dan Holger Kern, "The Effects of Government Policies on the Stock Market," *Undergraduate Research Journal*, University of South Carolina (2015).

¹⁹ Rossanto D Handoyo, Mansor Jusoh dan Moh. A.S. Zaidi, "Impact of Monetary Policy and Fiscal Policy on Indonesian Stock Market," *Expert Journal of Economic*, Vol. 3, Issue 2 (2015), 113-126.

Ogbulu, Torbira dan Umezinwa meneliti tentang hubungan langkah-langkah kebijakan fiskal Pemerintah dan harga saham di Nigeria selama periode 1985-2012 dengan menggunakan OLS, *co-integration*, *error correction mechanism* (ECM), *Granger Causality*, dan respon impuls, dan teknik varian dekomposit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran publik berpengaruh negatif signifikan terhadap harga saham. Sedangkan *Government Domestic Debt Outstanding* berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham. *Non-Oil Revenue* berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham. Tes *Granger Causality* menunjukkan bahwa Pengeluaran Publik, *Government Domestic Debt Outstanding* dan *Non-Oil Revenue*, dan Jumlah uang beredar dapat merubah harga saham.²⁰

E. Landasan Teori

1. Teori Efisiensi Pasar

Pada dasarnya penelitian ini ingin menguji bagaimana pasar bereaksi terhadap peristiwa kebijakan pemerintah. Reaksi yang ditunjukkan oleh pasar dapat bersifat positif ataupun negatif. Bersifat positif jika suatu informasi dapat meningkatkan harga-harga saham di pasar bursa, dan bersifat negatif jika berlaku sebaliknya. Jika pasar dapat bereaksi dengan cepat dan akurat untuk mencapai harga

²⁰ Onyemachi M Ogbulu, Lezaasi L. Torbira dan Chizoba L. Umezinwa, "Assessment of the Impact of Fiscal Policy Operations on Stock Price Performance: Empirical Evidence from Nigeria," *International Journal of Financial Research*, vol. 6, no. 2 (2015), 200.

keseimbangan baru yang sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia maka kondisi seperti itu disebut Pasar yang efisien.²¹

a. Syarat-Syarat Pasar yang Efisien

Berikut adalah syarat-syarat pasar dikatakan efisien:

- 1) Penyingkapan Informasi: informasi dapat diperoleh dengan mudah, cepat dan gratis;
- 2) Harga dapat berubah secara bebas: Harga tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun baik pembeli ataupun penjual saham, dan Undang-undang melarang adanya manipulasi harga;
- 3) Pasar senantiasa dalam keadaan seimbang: Pasar yang efisien ketika mendapat informasi baru, maka harga akan secara cepat menyesuaikan dan akan mencapai keseimbangan harga.

b. Ciri-ciri Pasar yang Efisien

Berikut ini merupakan ciri-ciri pasar efisien:

- a. Harga-harga saham merespon secara cepat dan tepat terhadap informasi baru;
- b. Perubahan harga terjadi secara random/acak, yang artinya perubahan harga hari ini tidak ada kaitannya dengan perubahan harga dimasa lalu;
- c. Tidak dapat menentukan mana saham yang menguntungkan atau merugikan dimasa depan;

²¹ Jogiyanto HM, *Teori Portofolio dan Analisis*, 351.

d. Dari segi informasi maka tidak dapat dibedakan antara investor naif atau investor canggih, karena tidak diperlukan analisis yang dalam untuk membuat keputusan investasi.

c. Bentuk Hipotesis Pasar Efisien

Jogiyanto dalam bukunya menjelaskan bahwa kunci utama untuk mengukur pasar yang efisien adalah hubungan antara harga sekuritas dengan informasi.²² Fama dalam Jogiyanto, menyajikan tiga macam bentuk utama dari efisiensi pasar berdasarkan tiga macam bentuk informasi, yaitu informasi masa lalu, informasi sekarang yang sedang dipublikasikan dan informasi privat sebagai berikut ini:

a. Pasar Efisien Bentuk Lemah

Pasar Efisien Bentuk Lemah (*weak form*) menyatakan bahwa harga saham sudah mencerminkan seluruh informasi yang diperoleh dengan memeriksa data perdagangan pasar seperti riwayat harga dimasa lalu, volume perdagangan, atau suku bunga jangka pendek. Data harga saham masa lalu tersedia secara luas dan gratis. Hipotesis bentuk lemah menekankan bahwa jika data tersebut menyampaikan sinyal yang tepat.

²² Jogiyanto HM, *Teori Portofolio dan Analisis*, 352.

b. Pasar Efisien Bentuk Setengah Kuat

Pasar dikatakan efisien setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan (*fully reflect*) semua informasi yang dipublikasikan, seperti:

- 1) Informasi yang dipublikasikan hanya mempengaruhi satu emiten, seperti pengumuman laba, pengumuman pembagian deviden, pengumuman pengembangan produk baru, pengumuman merger dan akuisisi, pengumuman perubahan metode akuntansi, pengumuman pergantian pemimpin perusahaan, dll.
- 2) Informasi yang dipublikasikan hanya mempengaruhi sebagian emiten yang bersangkutan, seperti informasi dari pemerintah agar meningkatkan kebutuhan cadangan bagi perusahaan perbankan, maka informasi ini hanya akan mempengaruhi saham perbankan saja.
- 3) Informasi yang dipublikasikan mempengaruhi seluruh emiten di pasar modal, seperti kebijakan pemerintah, pengumuman pergantian kabinet, bencana alam, kenaikan harga BBM, dll.

c. Pasar Efisien Bentuk Kuat

Pasar dikatakan efisien pasar bentuk kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan (*fully reflect*) semua informasi yang tersedia termasuk informasi yang privat.

Jika pasar efisien dalam bentuk ini, maka tidak ada individual investor atau grup dari investor yang dapat memperoleh keuntungan tidak normal (*abnormal return*) karena mempunyai informasi privat.

2. *Signaling Theory*

Signalling Theory atau teori sinyal dikembangkan oleh Ross yang menyatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor agar harga saham perusahaannya meningkat.²³ Hal positif dalam *signalling theory* dimana perusahaan yang memberikan informasi yang baik akan membedakan mereka dengan perusahaan yang tidak memiliki “berita baik” dengan menginformasikan pada pasar tentang keadaan mereka.

Wang dalam penelitiannya menyebutkan bahwa setiap kali ketika sinyal positif datang dari pemerintah, sebagian besar investor mengharapkan peningkatan indeks dan memberikan return yang tidak normal ke pasar. Namun, ketika sinyal negatif datang dari pemerintah, akan terjadi penjualan saham yang tajam. Ketika pasar mengalami depresi berkepanjangan, maka pemerintah diharapkan melakukan

²³ Ross, S.A., “The determination of financial structure: The incentive signaling structure,” *Bell Journal of Economics*, (1977) 8: 23-40.

rencana penyelamatan. Setelah rencana datang, investor mengikuti arus dan ini menyebabkan volatilitas pasar yang tinggi.²⁴

Manajer pada umumnya termotivasi untuk menyampaikan informasi yang baik mengenai perusahaannya ke publik secepat mungkin. Namun pihak luar perusahaan tidak mengetahui kebenaran dari informasi yang disampaikan tersebut. Jika manajer dapat memberi sinyal yang meyakinkan, maka publik akan terkesan dan hal ini akan terefleksi pada harga sekuritas.

F. Hipotesis

Pasar modal merupakan salah satu instrumen ekonomi yang sangat penting yang berfungsi menarik para pelaku pasar modal agar ikut berpartisipasi kedalamnya. Pasar modal haruslah bersifat likuid dan efisien. Pasar modal dapat dikatakan likuid jika para pelaku pasar modal dapat dengan mudah melakukan transaksi di pasar modal. Kemudahan tersebut dapat berupa fasilitas yang diberikan, seperti fasilitas transaksi *on-line* lintas Negara dan transaksi lainnya. Pasar modal dikatakan efisien jika harga saham mencerminkan perusahaan secara akurat. Artinya harga saham telah mencerminkan dengan cepat dan tepat semua informasi yang diketahui. Informasi tersebut dapat berasal dari *financial statement* atau kebijakan pemerintah.

²⁴ Liya Wang, "The Effect of Government Policy on China's Stock Market," *Dissertation no. 3716 Gutenberg AG, Feldkirchstrasse 13, FL – 9494, Schaan of the University of St. Gallen, Graduate School of Business Administration, Economics, Law and Social Sciences (HSG)*, 2010.

Berangkat dari teori efisiensi pasar yang dikembangkan oleh Fama, bahwa suatu pasar sekuritas dikatakan efisien jika harga-harga saham sekuritas “mencerminkan secara penuh” informasi yang tersedia.²⁵ Definisi dari Fama ini menekankan pada dua aspek, yaitu “*Fully reflect*” dan “*Information available.*” Pengertian dari *Fully reflect* menunjukkan bahwa harga dari sekuritas secara akurat mencerminkan informasi yang ada. Pasar dikatakan efisien jika dengan menggunakan informasi yang tersedia, investor secara akurat dapat mengekspektasi harga dari sekuritas bersangkutan.

Amnesti pajak sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah merupakan suatu peristiwa yang diasumsikan mengandung informasi yang dapat memberikan sentimen positif di pasar modal syariah. Faktor yang mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan amnesti pajak adalah pertama, adanya fenomena problem rendahnya penerimaan negara dari aspek pajak, seperti rendahnya rasio jumlah wajib pajak dengan jumlah penduduk, tingginya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), pelarian pajak (*tax evasion*), moralitas pajak (*tax morality*), kesadaran pajak (*tax compliance*), kerumitan administrasi (*administration complexity*), kepercayaan pada institusi (*institutional trust*), kemampuan untuk

²⁵Eugene F. Fama, “Efficient Capital Markets: a Review of Theory and Empirical Work,” *Jurnal of Finance*, Volume 25, Issue 2, *Papers and Proceeding of the Twenty-Eighth Annual Meeting of the American Finance Association New York, N. Y. December, 28-30, 1969 (May, 1970)*, 383-417.

menerapkan (*capacity to implement*).²⁶ Kedua, kebijakan amnesti pajak merupakan upaya pencapaian target penerimaan pajak secara cepat dan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.²⁷

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam.²⁸ Dapat disimpulkan bahwa di Indonesia terdapat banyak investor muslim.²⁹ Dalam konteks investasi di pasar modal, seorang investor muslim harus berbekal dan mematuhi pada norma dan etika investasi yang sesuai dengan prinsip syariah atau dengan kata lain tidak melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Hal tersebut dimaksudkan agar investasi yang dilakukan di pasar modal mendapatkan manfaat dan keberkahan. Investasi dalam persepektif Islam hanya dapat dilakukan pada instrumen yang sesuai dengan syariah Islam dan tidak mengandung riba. Investasi juga hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak (emiten) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentang dengan syariat Islam. Penelitian ini hanya melihat reaksi saham-saham syariah yang masuk dalam Jakarta Islamic Index (JII) karena JII merupakan produk unggulan (*benchmark*) saham-saham syariah di Indonesia.

²⁶ Bintoro Wardiyanto, "Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*): Perspektif Kerangka Kerja Implementasi *Sunset Policy* berdasarkan UU No 28 tahun 2007," *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Universitas Airlangga, Th. XXI. No. 4 (Oktober–Desember 2008), 328–335.

²⁷ Siap-siap, Data Perbankan jadi Alat Incar Pajak Pada 2017, www.Cnn.Indonesia.com, (diakses 27 September 2016).

²⁸ Eric P. Putra, "Persentase Umat Islam di Indonesia Jadi 85 Persen," *Republika.co.id*, (diakses 24 November 2016).

²⁹ Sakinah R.D. Setiawan, "Jumlah investor Pasar Modal Syariah Terus Meningkat," *www.Kompas.com*, (diakses 24 November 2016).

Investor muslim berkaitan dengan harta dan penghasilannya, terdapat kewajiban berupa zakat bagi yang telah memenuhi syarat. Sebagai warga negara Indonesia, Investor muslim juga memiliki kewajiban pajak bagi yang telah memenuhi syarat, karena telah dibuat undang-undang yang mewajibkan hal tersebut. Kebijakan amnesti pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah seharusnya ditanggapi positif oleh investor muslim dengan ikut mensukseskan amnesti pajak.

Untuk melihat bagaimana pasar bereaksi terhadap amnesti pajak dalam penelitian ini digunakan nilai *abnormal return* (AR). Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dari sekuritas bersangkutan. Reaksi tersebut dapat diukur dengan menggunakan return sebagai nilai perubahan harga atau dengan menggunakan *abnormal return*. Jika suatu peristiwa mengandung informasi maka akan memberikan *abnormal return* kepada pasar. Sebaliknya jika suatu peristiwa tidak mengandung informasi maka tidak memberikan *abnormal return*.³⁰

Penelitian yang membuktikan bahwa amnesti pajak merupakan peristiwa yang mengandung informasi adalah penelitian yang dilakukan oleh Bayer dengan judul “*The Occurrence of Tax Amnesties: Theory and Evidence*,” ia menemukan adanya peningkatan kepatuhan pajak setelah kebijakan amnesti pajak di Amerika Serikat tahun 1981 dan tahun 2011, serta bertambahnya penerimaan negara secara cepat. Ia menyarankan

³⁰ Jogyanto HM, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi kedua (Yogyakarta: BPFE, 2000), 393.

pemerintah juga harus membuat undang-undang yang kredibel, untuk mengantisipasi adanya peningkatan anggaran dimasa depan setelah kebijakan amnesti pajak diberlakukan.³¹

Penelitian yang menemukan pengaruh signifikan antara peristiwa atau kebijakan Pemerintah terhadap pasar saham dilakukan oleh Paultje (2001), Chatziantoniou, Duffy dan Filis (2013), Khan dkk. (2014), Somani dan Kern (2015), Handoyo, Jusoh dan Zaidi (2015), dan Ogbulu, Torbira dan Umezinwa (2015). Penelitian-penelitian tersebut telah membuktikan suatu peristiwa dapat mempengaruhi pasar modal.

Setelah memaparkan tentang kerangka teoritis dan bukti empiris penelitian terdahulu, maka selanjutnya perlu merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan awal atau kesimpulan sementara hubungan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen sebelum dilakukan penelitian dan harus dibuktikan melalui pengujian. Dugaan tersebut diperkuat melalui teori atau jurnal yang mendasari dari penelitian terdahulu.³² hipotesis pertama yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : kebijakan amnesti pajak memberikan *abnormal return* pada saham-saham syariah yang masuk daftar JII periode Juni-November tahun 2016.

³¹ Ralp-C Bayer, Harald Oberhofer dan Hannes Winner, "The Occurrence of Tax Amnesties: Theory and Evidence," *Working Papers in Economics and Finance* (Juni 2014), 31-32.

³² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kombinasi: Mix Methods* (Bandung: Alfabeta, 2013), 99.

Selanjutnya penelitian ini juga ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara reaksi pasar sebelum dengan sesudah adanya amnesti pajak. Pengujian ini untuk mengetahui secara detail apakah amnesti pajak dapat memberikan efek positif atau negatif terhadap harga-harga saham syariah yang masuk daftar JII periode Juni-November 2016.

Penelitian yang dilakukan oleh Paultje yang meneliti reaksi pasar modal terhadap pengumuman kabinet baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar modal di Indonesia tidak efisien secara informasi, yaitu terdapat perbedaan *abnormal return* yang cukup signifikan sebelum dan sesudah peristiwa, namun volume aktivitas perdagangan tidak ada perubahan yang signifikan.³³

Dari penjelasan di atas, maka hipotesa kedua penelitian ini adalah:

H2 : Terdapat perbedaan *abnormal return* yang signifikan pada perusahaan JII sebelum dan sesudah adanya kebijakan amnesti pajak.

Untuk menguji apakah suatu informasi dapat memberikan pengaruh terhadap perubahan harga-harga saham di pasar modal tidak hanya dengan melihat ada tidaknya *abnormal return*, tetapi dapat juga digunakan aktivitas volume perdagangan atau disebut *trading volume activity* (TVA). Seperti penelitian yang dilakukan oleh Arland Vigo, ia

³³ Novi Paultje, "Reaksi Pasar Modal..", hlm. 63.

meneliti pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap volume transaksi saham harian dan kinerja keuangan perusahaan publik. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah *Good Corporate Governance* berpengaruh secara signifikan terhadap volume transaksi saham ($\text{sig } 0.023 < \alpha$) dan *Good Corporate Governance* juga berpengaruh secara signifikan terhadap beberapa rasio keuangan. Pada penelitian ini juga dilakukan pengujian perbedaan volume transaksi saham dari perusahaan yang memiliki *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dengan perusahaan yang tidak memiliki CGPI. Hasilnya mengindikasikan tidak ada beda nyata volume transaksi saham perusahaan yang memiliki CGPI dan perusahaan yang tidak memiliki CGPI.³⁴

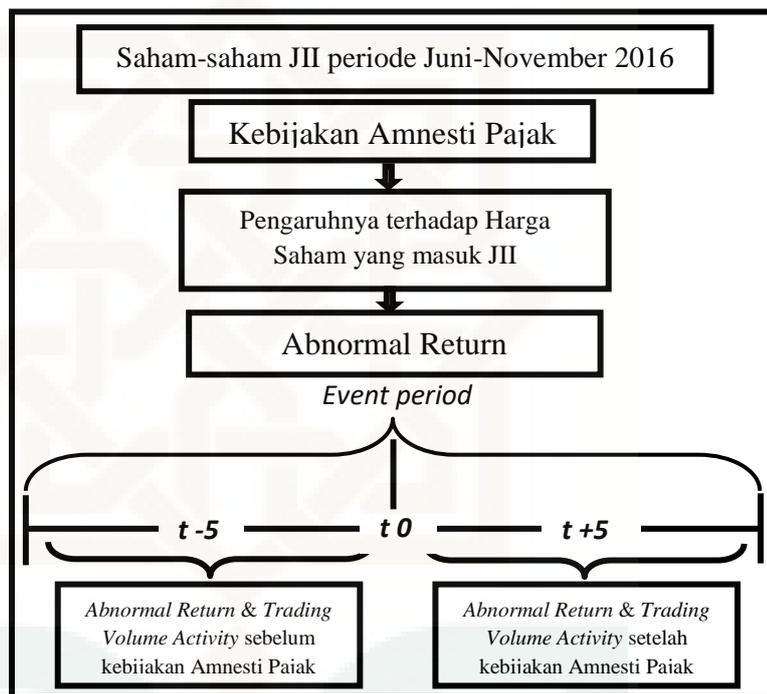
Dari penjelasan di atas dapat dibuat hipotesis ketiga yaitu:

H3 : Terdapat *trading volume activity* yang signifikan pada perusahaan JII sebelum dan sesudah adanya kebijakan amnesti pajak.

³⁴ Arland Vigo, "Good Corporate Governance: Dampaknya terhadap Volume Transaksi Saham Harian dan Kinerja Keuangan Perusahaan Publik," *Tesis Sekolah Pascasarjana*, Universitas Gajah Mada Yogyakarta (2005).

Dari penjelasan di atas dapat dibuat kerangka berfikir yang sistematis supaya dapat memudahkan dalam memahami alur penelitian ini, adapun kerangka berfikir penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1
Kerangka Berfikir



G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi peristiwa (*event study*) yang menganalisis adanya reaksi pasar sebagai akibat dari terjadinya suatu peristiwa. *Event study* disebut juga dengan analisis residual (*residual analysis*) atau pengujian indeks kinerja tidak normal (*abnormal performance index test*) atau pengujian reaksi pasar (*market reaction*

test). Studi peristiwa banyak digunakan untuk menganalisis pengaruh dari suatu peristiwa terhadap harga-harga saham di pasar modal.³⁵

Studi peristiwa adalah suatu penelitian untuk dapat mengamati pergerakan harga saham dipasar modal, seperti ada tidaknya *abnormal return* yang akan diperoleh pemegang saham setelah adanya suatu peristiwa.³⁶ Penelitian *event study* sudah banyak digunakan untuk menguji reaksi pasar akibat terjadinya suatu peristiwa.

Pengujian kandungan informasi dan pengujian efisiensi pasar merupakan dua pengujian yang berbeda. Pengujian kandungan informasi dimaksudkan untuk melihat reaksi dari suatu pengumuman. Jika pengumuman itu mengandung informasi, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar ini dapat diukur dengan menggunakan *return* sebagai nilai perubahan harga atau dengan menggunakan *abnormal return*.³⁷ Jika digunakan *abnormal return*, maka dapat diasumsikan bahwa suatu peristiwa yang mengandung informasi akan memberikan *abnormal return* kepada pasar. Sebaliknya bila tidak mengandung informasi, maka tidak akan memberikan *abnormal return* kepada pasar.

Event study juga dapat memberikan rasionalitas di dalam pasar, bahwa efek suatu peristiwa akan segera dengan cepat terefleksi pada

³⁵ Jogiyanto HM, *Studi Peristiwa: Menguji Reaksi Pasar Modal Akibat Suatu Peristiwa*, (Yogyakarta: BPFE, 2010), 4-5.

³⁶ Peterson, "Event Studies: A review of Issues and Metodology, Quaterly," *Journal of Business and Economic*, Vol. 28, No. 3 (Summer, 1989), 13-39.

³⁷ Jogiyanto HM, *Teori Portofolio dan Analisis*, 420.

harga suatu surat berharga di pasar modal.³⁸ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *event study* adalah suatu metode untuk mengukur efek suatu peristiwa tertentu misal peristiwa ekonomi, keuangan, dan non-ekonomi terhadap nilai suatu perusahaan yang tercermin dengan adanya perubahan harga dan aktivitas volume perdagangan (*trading volume activity*) surat berharga dipasar modal.

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³⁹ Populasi dalam penelitian ini adalah saham-saham yang masuk daftar JII (*Jakarta Islamic Index*) periode Juni-November 2016.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu salah satu teknik *nonprobability sampling* dengan penentuan sampel yang ditentukan berdasarkan kesesuaian dan karakteristik tertentu. Kriteria yang digunakan untuk memilih sampel dalam penelitian ini antara lain:

³⁸ A Craig MacKinlay, "Event Studies in Economic and Finance," *Journal of Economic Literature*, Vol. XXXV (March 1997), 13-39.

³⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kombinasi*, 115.

- a. Perusahaan tersebut terdaftar pada kelompok JII (*Jakarta Islamic Index*) periode Juni-November 2016. Alasan digunakannya perusahaan yang masuk daftar JII karena merupakan 30 perusahaan pilihan yang lolos uji dan konsisten terhadap kepatuhan syariah, serta memiliki nilai rata-rata likuiditas yang tinggi;
- b. Memiliki data yang lengkap selama Periode pengamatan yaitu mulai tanggal 11 Juli 2016 sampai tanggal 25 Juli 2016. Penentuan periode pengamatan tersebut merupakan batasan penelitian supaya terfokus pada pengaruh yang timbul akibat adanya pengesahan UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data runtut waktu (*time series*), yaitu data yang secara kronologis disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu. Data runtut waktu digunakan untuk melihat pengaruh perubahan dalam rentang waktu tertentu.⁴⁰ Variasi *time series* yang digunakan adalah data harian, dimana peneliti akan mengumpulkan harga saham per hari selama periode pengamatan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi, telah dikumpulkan, dan diolah oleh pihak lain,

⁴⁰ Mudjarad Kuncoro, *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi ke-4 (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), 29.

biasanya sudah dalam bentuk publikasi, berupa data-data variabel bebas.⁴¹ Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari wawancara dengan pihak Bursa Efek Indonesia. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari pojok bursa UKDW Yogyakarta berupa *close price*, IHSG, volume perdagangan, dan jumlah saham beredar.

4. Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat).⁴² Variabel independen dalam penelitian ini adalah peristiwa kebijakan amnesti pajak. Sedangkan variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen. Dalam penelitian ini variabel dependen adalah *abnormal return* (AR) dan *trading volume activity* (TVA).

Berikut merupakan penjelasan mengenai definisi operasional variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini:

a. Amnesti Pajak

Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 30.

⁴² Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, 59.

penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.⁴³

Amnesti pajak seharusnya menjadi *good news* bagi calon investor karena seperti yang ungkapkan oleh Bintoro Wardiyanto dalam penelitiannya, bahwa sebuah kebijakan akan memiliki kekuatan hukum tinggi dan mengikat jika kebijakan tersebut diatur dalam UU.⁴⁴

Seperti yang diketahui bahwa kebijakan amnesti pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2016 telah diatur dalam UU No. 11 tahun 2016 tentang Pajak Pengampunan. Hal ini tentu menyiratkan bahwa segala sesuatu yang berkenaan dengan kebijakan tersebut telah diatur dalam UU.

UU No. 11 tahun 2016 tentang Pajak Pengampunan telah disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 1 Juli 2016, kebijakan ini mulai diberlakukan pada tanggal 18 Juli 2016. Penelitian ini akan menganalisa bagaimana kebijakan amnesti pajak ini dapat

⁴³ Dirjen Pajak Kemenkeu, "Amnesti Pajak," www.pajak.go.id, diakses tanggal 18 Agustus 2016.

⁴⁴ Bintoro Wardiyanto, "Kebijakan Pengampunan Pajak...", hlm. 334.

mempengaruhi harga-harga saham syariah yang masuk daftar JII periode Juni-November 2016. Penelitian dilakukan dengan metode *event study* yaitu dengan melihat adanya AR dan TVA pada hari sebelum dan sesudah peristiwa amnesti pajak. Kemudian hasil temuan tersebut akan diperkuat dengan wawancara kepada pihak Bursa Efek Indonesia perwakilan Yogyakarta.

b. *Abnormal Return* (AR)

Abnormal return adalah selisih antara return yang sesungguhnya (*actual return*) dengan return yang diharapkan (*expected return*) yang dapat terjadi sebelum informasi resmi diterbitkan atau telah terjadi kebocoran informasi (*leakage of information*) sesudah informasi resmi diterbitkan. Adapun tahapan menghitung *abnormal return* adalah sebagai berikut:⁴⁵

1) Menghitung *Actual Return* (R)

$$R_{i,t} = \frac{P_{i,t} - P_{i,t-1}}{P_{i,t-1}}$$

Notasi:

$R_{i,t}$ = *actual return* saham (*i*) pada hari ke-*t*

$P_{i,t}$ = harga saham (*i*) pada hari ke-*t*

$P_{i,t-1}$ = harga saham *i* sebelum hari ke *t*

⁴⁵ Jogiyanto HM., *Teori Portofolio dan Analisis*, 415-432.

2) Menghitung *Market Return* (RM)

$$RM.t = \frac{IHSgt - IHSgt - 1}{IHSgt - 1}$$

Notasi:

RM. t = *market return* pada hari ke-*t*

IHSgt = index harga saham gabungan pada hari ke-*t*

IHSgt - 1 = index harga saham gabungan pada hari ke t-1

3) Menghitung *Abnormal Return* (AR)

$$AR_{i,t} = R_{i,t} - RM.t$$

Notasi:

AR_{i,t} = *abnormal return* saham (*i*) pada hari ke-*t*

R_{i,t} = *actual return* saham (*i*) pada hari ke-*t*

RM. t = *market return* pada hari ke-*t*

4) Menghitung *Average Abnormal Return* (AAR)

$$AAR_t = \frac{\sum_{i=t}^k AR_{i,t}}{k}$$

Notasi:

AAR_t = *Average Abnormal Return* pada hari ke-*t*

AR_{i,t} = *Abnormal return* saham (*i*) pada hari ke-*t*

k = jumlah saham yang terpengaruh oleh *event* yang dipilih

5) Menghitung *Cumulative Average Abnormal Return* (CAAR)

$$CAAR_t = \sum_{a=t-5}^t AAR_a$$

Notasi:

CAAR_t = *Cumulative Abnormal Return* pada hari ke-*t*

AAR_a = *Average Abnormal Return* pada hari ke-*a*, yaitu mulai *t*-5 sampai hari ke-*t*

c. *Trading Volume Activity* (TVA)

Trading volume activity (TVA) digunakan untuk mengukur apakah para pemodal individu mengetahui informasi yang dikeluarkan perusahaan dan menggunakannya dalam pembelian atau penjualan saham, sehingga akan mendapatkan keuntungan di atas normal (*abnormal return*).⁴⁶ Adapun tahapan menghitung TVA adalah sebagai berikut:⁴⁷

1) Menghitung *Trading Volume Activity* (TVA)

$$TVA = \frac{\Sigma \text{ saham perusahaan } i \text{ yang diperdagangkan pada waktu } t}{\Sigma \text{ saham perusahaan } i \text{ yang beredar pada waktu } t}$$

2) Menghitung *Average Trading Volume Activity* (ATVA)

$$ATVA = \frac{\sum_{i=t}^k TVA_{i,t}}{k}$$

Notasi:

ATVA = rata-rata TVA pada hari ke-*t*

TVA_{*i, t*} = TVA saham *i* pada hari ke-*t*

k = jumlah saham yang terpengaruh oleh *event*

⁴⁶ Indarti, "Analisis Perbandingan Harga...", hlm. 58.

⁴⁷ Setyawan, "Analisis Reaksi Pasar...", hlm. 42.

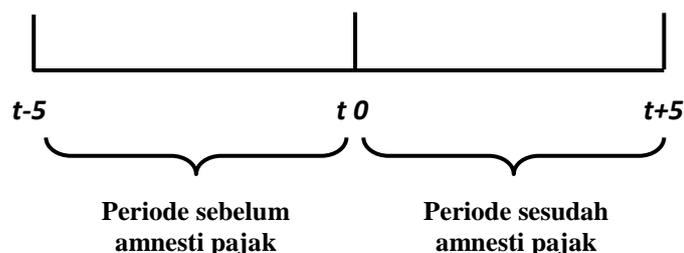
5. Periode Pengamatan

Periode pengamatan adalah waktu sebelum dan sesudah terjadinya peristiwa. Umumnya periode pengamatan juga melibatkan hari sebelum tanggal peristiwa untuk mengetahui apakah terjadi kebocoran informasi karena umumnya informasi sudah diketahui publik di hari-hari sebelumnya.⁴⁸ Periode pengamatan dalam penelitian ini yaitu selama 10 hari perdagangan (*trading days*), terdiri dari $t-5$ (*prevent*, 5 hari sebelum peristiwa) dan $t+5$ (*post event*, 5 hari setelah peristiwa).

Penentuan periode 5 hari sebelum dan 5 hari setelah peristiwa adalah untuk mengetahui adanya perubahan harga saham yang tidak biasa (*abnormal return*). Penentuan periode pengamatan tersebut merupakan batasan penelitian supaya fokus pada pengaruh yang timbul akibat adanya pengesahan UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Periode pengamatan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2
Periode Pengamatan



⁴⁸ HM Jogiyanto, *Studi Peristiwa: Menguji Reaksi Pasar Modal Akibat Suatu Peristiwa* (Yogyakarta: BPFEE (2010), 28.

6. Teknik Analisis Data

a. Analisis Deskripsi Data Penelitian

Analisis ini memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari grafik perubahan *Actual Return* dan *Market Return* saham selama 10 hari pengamatan serta perubahan *Abnormal return* dan *Trading Volume Activity* selama 10 hari pengamatan.

b. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Statistik Deskriptif dilakukan untuk menentukan nilai minimum, maximum, tingkat rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari rata-rata *abnormal return* dan rata-rata *trading volume activity* selama 10 hari pengamatan.

c. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak.⁴⁹ Dalam penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05. Pedoman pengambilan keputusan dalam uji

⁴⁹ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), 160.

normalitas data dengan menggunakan *one sample Kolmogorov-Smirnov* yaitu:

- 1) Nilai signifikansi atau nilai probabilitas $\leq 0,05$ maka distribusi data adalah tidak normal;
- 2) Nilai signifikansi atau nilai probabilitas $> 0,05$ maka distribusi data adalah normal.

d. Uji Hipotesis

1) Uji Hipotesis I

Pengujian hipotesis 1 pertama kali menghitung *abnormal return*, dimana *abnormal return* suatu saham merupakan selisih antara *actual return* dan *expected return*. Untuk menghitung *abnormal return* dari saham *i* pada hari ke *t* digunakan formula sebagai berikut:

$$AR_{i,t} = R_{i,t} - ER_{i,t}$$

Dalam penelitian ini *expected return* dihitung menggunakan *market adjusted model*, maka untuk menghitung *abnormal return* digunakan rumus:

$$ER_{i,t} = RM,t$$

maka:

$$AR_{i,t} = R_{i,t} - RM,t$$

Sedangkan untuk menghitung return pasar saham (R_m) dicari dengan menggunakan dasar indeks IHSI. Untuk mencari return pasar digunakan formulasi sebagai berikut:

$$R_{M,t} = \frac{IHSI_t - IHSI_{t-1}}{IHSI_{t-1}}$$

Untuk menguji hipotesis nol yang menyatakan bahwa rata-rata *abnormal return* adalah sama dengan nol, digunakan uji t , sedangkan sebagai standarisasinya digunakan *Standarisasi Abnormal Return (SAR)*. Dalam penelitian ini, uji t yang digunakan untuk menguji hipotesis nol yang menerangkan bahwa rata-rata *abnormal return* sama dengan nol adalah sebagai berikut:

$$t_{\text{Hitung}} = \frac{\text{AAR}}{\text{Kesalahan Standar Estimasi, atau}}$$

$$SAR_{i,t} = \frac{\text{AAR}}{\text{Kesalahan Standar Estimasi}}$$

T hitung ini merupakan standarisasi untuk *abnormal return* dengan nilai rata-rata nol dan variannya adalah satu. Pedoman ini digunakan untuk menentukan standarisasi *abnormal return*. Standarisasi yang dimaksud adalah dengan membagi nilai *abnormal return* dengan kesalahan standar estimasi (Sie).

Untuk menentukan SAR ini, maka langkah pertama adalah mencari standar error (Sie) masing-masing sekuritas di periode estimasi. Rumus yang dipakai adalah:

$$S_{ie} = \sqrt{\sum_{k=1}^T \frac{(R_{i,k} - R_{i,k*})^2}{T-2}}$$

Notasi:

S_{ie} = standar error estimasi untuk saham individual selama T hari dalam periode estimasi

$R_{i,k}$ = return yang terjadi pada periode k selama periode estimasi

$R_{i,k*}$ = return yang diprediksi pada periode k dalam periode estimasi

t = periode estimasi

Pengujian statistik terhadap *abnormal return* bertujuan untuk melihat signifikansi *abnormal return* yang ada di periode peristiwa. Signifikansi yang dimaksud adalah bahwa *abnormal return* tersebut secara statistik signifikan tidak sama dengan nol.

Setelah hasil perhitungan *abnormal return* pada periode *event* diperoleh, lalu dilakukan agregasi surat berharga (selama periode yang diteliti, mulai dari pertama sampai terakhir) dan agregasi waktu. Agregasi untuk *abnormal return* sekuritas secara individual meminta pengujian secara *abnormal return cross section* untuk setiap periode. Untuk mencari signifikansi *abnormal return* tersebut, maka perlu menghitung $CARN_t$, dimana $CARN_t$ merupakan kumulatif *abnormal return* yang dihitung secara *cross section*, dengan rumus:

$$CAAR_{n,t} = AAR_t + AAR_{t+1}$$

Notasi:

$CAAR_{n,t}$ = *Cumulatif abnormal return for N* sekuritas
untuk periode sepanjang n

AAR_t = rata-rata *abnormal return* periode t

AAR_{t+1} = rata-rata *abnormal return* periode t
kemudian diakumulasikan dengan CAAR
periode sebelumnya.

t = periode *event study*

Rata-rata *abnormal return* seluruh saham pada hari ke t
(yang menunjukkan agregasi surat berharga) dihitung dengan
formula sebagai berikut :

$$AR_{n,t} = \frac{\sum_{i=1}^n AR_{i,t}}{n}$$

n = jumlah seluruh saham yang diteliti

Standarisasi *abnormal return* portofolio selama periode
peristiwa, dirumuskan sebagai berikut:

$$SAR_{n,t} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n AR_{i,t}}{S_{i,t}}}$$

Notasi:

$SAR_{n,t}$ = *Standarisasi Abnormal Return Portofolio* , dihitung
selama periode peristiwa

n = jumlah sample yang diteliti

2) Uji Hipotesis II

Pengujian hipotesis II pertama kali dilakukan pengelompokan *Abnormal Return* sebelum dan sesudah kebijakan amnesti pajak, kemudian dihitung rata-rata dan deviasi standarnya. Setelah deviasi standar saham diperoleh, langkah berikutnya adalah menghitung t-hitung pada taraf signifikansi 5%, dan membandingkannya dengan t-tabel untuk mendapatkan hasil apakah akan menolak atau menerima H_0 . Langkah - langkah tersebut di atas diuraikan secara singkat sebagai berikut:

- a) Menghitung rata-rata *abnormal return* seluruh saham yang dijadikan sampel sebelum dan sesudah peristiwa:

$$AR_{\text{sebelum}} = \frac{\sum_{t=-5}^{t=-1} AR_{\text{sebelum}}}{n}$$

$$AR_{\text{sesudah}} = \frac{\sum_{t=+5}^{t=+1} AR_{\text{sesudah}}}{n}$$

Notasi:

n = Jumlah saham yang diteliti

- b) Menghitung defiasi standar rata-rata *abnormal return* sebelum dan sesudah peristiwa, dengan formula sebagai berikut:

$$\sigma_{\text{sebelum}} = \sqrt{\frac{\sum_{t=-5}^{t=-1} AR_{\text{sebelum}} - AR_{\text{sebelum}}}{n - 1}}$$

$$\sigma_{\text{sesudah}} = \sqrt{\frac{\sum_{t=-5}^{t=+1} \text{AR}_{\text{sesudah}} - \text{AR}_{\text{sesudah}}}{n - 1}}$$

c) Melakukan uji statistik yaitu uji t (pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$), dengan formula sebagai berikut :

$$t = \frac{\text{AR}_{\text{sesudah}} - \text{AR}_{\text{sebelum}}}{\sigma_{\text{sesudah}} \frac{2}{n} - \sigma_{\text{sebelum}} \frac{2}{n}}$$

3) Uji Hipotesis III

Pengujian hipotesis III pertama kali dilakukan pengelompokan *Trading Volume Activity* sebelum dan sesudah kebijakan amnesti pajak, kemudian dihitung rata-rata dan deviasi standarnya. Setelah deviasi standar saham diperoleh, langkah berikutnya adalah menghitung t-hitung pada taraf signifikansi 5%, dan membandingkannya dengan t-tabel untuk mendapatkan hasil apakah akan menolak atau menerima H_0 . Langkah - langkah tersebut di atas diuraikan secara singkat sebagai berikut:

a) Menghitung TVA (*Trading Volume Activity*)

$$\text{TVA} = \frac{\sum \text{saham perusahaan } i \text{ yang diperdagangkan pada waktu } t}{\sum \text{saham perusahaan } i \text{ yang beredar pada waktu } t}$$

b) Menghitung ATVA (*Average Trading Volume Activity*)

$$\text{TV}_{\text{Asebelum}} = \frac{\sum_{t=-5}^{t=-1} \text{TV}_{\text{Asebelum}}}{n}$$

$$\text{TV}_{\text{Asesudah}} = \frac{\sum_{t=-5}^{t=+1} \text{TV}_{\text{Asesudah}}}{n}$$

Notasi:

n = Jumlah saham yang diteliti

- c) Menghitung defiasi standar rata-rata TVA sebelum dan sesudah peristiwa, dengan formula sebagai berikut:

$$\sigma_{\text{sebelum}} = \sqrt{\frac{\sum_{t=-5}^{t=-1} \text{TVAselam} - \text{TVAselam}}{n - 1}}$$

$$\sigma_{\text{sesudah}} = \sqrt{\frac{\sum_{t=+5}^{t=+1} \text{TVAsesudah} - \text{TVAsesudah}}{n - 1}}$$

- d) Melakukan uji statistik yaitu uji t (pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$), dengan formula sebagai berikut :

$$t = \frac{\text{TVAsesudah} - \text{TVAselam}}{\sigma_{\text{sesudah}} \frac{2}{n} - \sigma_{\text{sebelum}} \frac{2}{n}}$$

H. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penulisan tesis ini bisa terarah, integral dan sistematis maka dalam tesis ini dibagi dalam 5 bab dimana setiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang pendahuluan yang merupakan landasan awal dalam melakukan penelitian. Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori, pengembangan hipotesis, dan metode penelitian (jenis data dan sifat penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel dan dan teknik analisis data), serta

sistematika pembahasan.

Bab II Amnesti Pajak dan Pasar Modal di Indonesia, menguraikan tentang amnesti pajak dan pasar modal di Indonesia yang digunakan sebagai variabel penelitian.

Bab III Analisis Data dan Pembahasan, berisi tentang pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen serta pembahasan hasil dari penelitian.

Bab IV Penutup, berisi tentang kesimpulan, keterbatasan dan saran dari hasil analisis data yang berkaitan dengan penelitian.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan hasil pembahasan penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Peristiwa amnesti pajak tidak memiliki kandungan informasi bagi investor saham-saham syariah yang masuk daftar JII periode Juni-November 2016, ditunjukkan dari tidak adanya *abnormal return* yang signifikan selama periode peristiwa. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa BEI dan pemerintah berupaya mensukseskan kebijakan amnesti pajak dengan menyiapkan instrumen-instrumen unggulan untuk menampung dana repatriasi dan gencar melakukan sosialisasi. Meski secara khusus pasar modal syariah tidak terdapat *abnormal return* yang signifikan, namun secara umum kondisi pasar modal mengalami peningkatan.
2. Reaksi pasar modal terhadap amnesti pajak hanyalah sesaat dan tidak berkepanjangan ditunjukkan dari pergerakan harga saham yang mengalami penurunan pada saat peristiwa, dan mengalami kenaikan atau kembali normal setelah peristiwa. Sedangkan dari hasil analisis pada *abnormal return* menunjukkan bahwa peristiwa amnesti pajak tidak memiliki kandungan informasi yang relevan. Artinya kenaikan yang terjadi pada pergerakan harga saham bukan merupakan akibat peristiwa amnesti pajak melainkan dari faktor-faktor lain yang

mempengaruhi pasar modal. Menurut Kepala BEI Kantor cabang DIY Bapak Irfan, mengatakan bahwa investor saat ini lebih menyukai saham perbankan diikuti saham properti dan selanjutnya saham infrastruktur. Mengingat perusahaan yang masuk dalam JII periode Juni-November 2016 tidak terdapat perusahaan perbankan. Ini merupakan satu alasan mengapa tidak terdapat *abnormal return* pada perusahaan JII disekitar tanggal diberlakukannya kebijakan amnesti pajak.

3. Banyak investor pada saham-saham syariah yang masuk daftar JII periode Juni-November 2016 termasuk dalam investor yang cenderung menghindari resiko (*risk averse*). Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji beda aktifitas volume perdagangan (TVA) sebelum dan sesudah peristiwa.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak luput dari berbagai keterbatasan, adapun keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan penelitian ini terletak pada periode pengamatan yang relatif pendek yaitu 10 hari (selama 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah kebijakan amnesti pajak). penelitian selanjutnya dapat menambahkan periode pengamatan hingga amnesti pajak berakhir yaitu 31 Maret 2017.

2. Sampel yang digunakan juga sangat terbatas yaitu hanya 30 perusahaan JII, hanya 3,8% dari keseluruhan saham syariah yaitu 306 perusahaan di Bursa Efek Indonesia.
3. Model yang digunakan untuk mengestimasi return adalah dengan *market adjusted model*.
4. Disamping itu rasio yang digunakan hanya terbatas pada *abnormal return* dan *trading volume activity* saja.

C. Saran

Berawal dari keterbatasan penelitian maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah perlu memperpanjang periode pengamatan, atau bahkan perlu menambahkan periode estimasi sebelum periode jendela.
2. Sampel yang digunakan juga dapat diperluas dengan mencantumkan beberapa syarat yang dibutuhkan dalam pengambilan sampel. Sampel yang digunakan dapat berupa saham-saham sektor lain seperti sektor properti, perbankan atau lainnya.
3. Model yang digunakan untuk mengestimasi return selain *market adjusted model* dapat menggunakan *Mean Adjusted Model* atau *Market Model*.
4. Disamping itu perlu menambahkan variabel lain selain *abnormal return* dan TVA, seperti kapitalisasi pasar atau variabel *price earning*

ratio (PER) karena PER juga sering digunakan oleh investor untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam mencetak laba.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian, Sutedi. *Pasar Modal Syariah: sarana investasi keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, Cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance, A-Z Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. GramediaPustaka Utama. 2009.
- Fahmi, Irfan dan Hadi, Yovi Lavianti. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Teori dan Soal Jawab*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012.
- _____ *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013.
- HM, Jogiyanto. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi kedua, Yogyakarta: BPFE, 2000.
- _____ *Studi Peristiwa: Menguji Reaksi Pasar Modal Akibat Suatu Peristiwa*, Yogyakarta: BPFE, 2010.
- Huda, Nurul dan Muti, Ahmad. *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Al-Kharaj (Imam Abu Yusuf, Cet. 1*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.
- Huda, Nurul. *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoretis dan Sejarah*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- _____ *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Cetakan kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Kodrat, David Sukardi dan Indonanjaya, Kurniawan. *Manajemen Investasi, Pendekatan Teknikal dan Fundamental untuk Analisis Saham*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Kuncoro, Mudjarad. *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi ke-4. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011.
- Nafik HR, Muhammad. *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2009.
- Rahayu, Siti Kurnia. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Santoso, Singgih. *Panduan Lengkap SPSS Versi 23*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016.

- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sunariyah. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Edisi Kelima, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006.
- Zubir, Zalmi. *Manajemen portofolio, Penerapannya dalam Investasi Saham*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.

JURNAL

- Afonso, Antonio dan Sousa, Ricardo M. "The macroeconomic effects of fiscal policy," *Applied Economics*, 44:34, 4439-4454, 2012.
- Agbonika, Dr. Josephine .A.A. "Tax Amnesty for Delinquent Taxpayers: A Cliche in Nigeria," *Global Journal of Politics and Law Research*, Vol.3, No.3, pp.105-120, 2015.
- Aibangbee, Ehile A. dan Balogun, Tozaye. "Tax Amnesty: A Viable Option for Boosting Revenue." KPMG Switzerland, 2015.
- Akitobi, Bernardin dan Startmann, Thomas. "Fiscal Policy and Financial Markets," *The Economic Journal*, vol. 118, no. 533, pages 1971–1985, 2008.
- Alberto, Ferry. "Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Oleh Pemerintah Terhadap Potensi Peningkatan Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2015," *Jurnal Ilmiah Universitas Bakrie*, vol. 4, no. 1, 2016.
- Alm, James., McKee, Michael, dan Beck, William. "Amazing Grace: Tax Amnesties And Compliance," *National Tax Journal*, Vol. 43, no.1, 1990.
- Alm, James dan Beck, W. "Individual Response to State Tax Amnesties," *Southern Economic Journal*, 57 (4), 1043-1053, 1991.
- Alm, James dan Beck, William, "Tax Amnesties And Compliance In The Long Run: A Time Series Analysis," *National Tax Journal*, Vol. 46, no.1, 1993.
- Alm, James. "Tax Policy Analysis: The Introduction of a Russian Tax Amnesty." *Intesnational Studies Program, Working Paper 98-6*, 1998.
- Alm, James., Vazques, J. M. dan Wallace, S. "Do Tax Amnesties Work? The Revenue Effects of Tax Amnesties During the Transition in the Russian Federation," *Economic Analysis & Policy*, vol. 39, no. 2, 2009.

- Bamber, L.S. dan Y. Cheon, "Differential price and volume reactions to accounting earnings announcements." *The Accounting Review* 70 (3), 417-41, 1995.
- Baer, Katherine dan Borgne, Eric Le. "Tax Amnesties: Theory, Trends, and Some Alternatives." *International Monetary Fund, IMF Multimedia Services Division*, Washington D.C, 2008.
- Bhattacharya, Upal dan Dittmar, Amy, "Costless Versus Costly Signalling: Theory and Evidence from Share Repurchases." *paper of seminar participants at Indiana University*, 2001.
- Bayer, Ralp-C., Oberhofer, Harald dan Winner, Hannes. "The Occurrence of Tax Amnesties: Theory and Evidence." *Working Papers in Economics and Finance* No 2014-06, 2014.
- Borgne, Eric Le. "Economic and Political Determinants of Tax Amnesties oin The us States," *IMF Working Paper, International Monetary Fund*, 2006.
- Bose, P dan Jetter, M. "Liberalization and Tax Amnesty in a Developing Economy," *Economic Modelling*, vol. 29(2) 761-765, 2012.
- Campbell, John Y., Grossman, Sanford J. dan Wang Jiang. "Trading Volume and Serial Correlation in Stock Returns," *The Quarterly Journal of Economics*, 1993.
- Chatziantoniou, Ioannis., Duffy, David dan Filis, G. "Stock market response to monetary and fiscal policy shocks: multi-country evidence," *Economic Modelling*, no. 30, pp. 754-769, 2013.
- Daniel, Kent & Titman, Sheridan. "Market Reactions to Tangible and Intangible Information," *Journal of Finance, American Finance Association*, vol. 61(4), pages 1605-1643, 2006.
- Fama, Eugene F. "Efficient Capital Markets: a Review of Theory and Empirical Work," *Jurnal of Finance, Volume 25, Issue 2, Papers and Proceeding of the Twenty-Eighth Annual Meeting of the American Finance Association New York, N. Y. December, 28-30, 1969 (May, 1970)*, 383-417
- Farida, Ida dan Prawira, Adi. "The Effect of Granting Tax Amnesty to Tax Revenues," *Research Journal of Finance and Accounting* ISSN 2222-1697 (*Paper*) ISSN 2222-2847 (*Online*). Vol.6, No.4, 2015.
- Fisher, Ronald C., Goddeeris, John H dan Young, James C. "Participation in Tax Amnesties: the Individual Income Tax," *National Tax Journal*, Vol. 42, no, 1 (March, 1998), pp. (15-27).

- Fjeldstad, Odd Helge., Jensen, Soren Kirk dan Paulo, Francisco Miguel. "Tax amnesty in Angola: a fresh start or a vicious circle?" *Angola Brief*, CHR. Michelsen Institute, vol. 4, no. 9, 2014.
- Gede, B.P.I., Kadek, S. Ni dan Ari, S.D. Nyoman. "Reaksi Pasar Modal Indonesia Terhadap Peristiwa Politik (*Event Study* pada Peristiwa Pelantikan Joko Widodo Sebagai Presiden Republik Indonesia Ke-7)," *e-Journal Universitas Pendidikan Ganesha*, vol. ,3 no.1, 2015.
- Handoyo, Rossanto D., Jusoh, Mansor dan Zaidi, Moh. A.S. "Impact of Monetary Policy and Fiscal Policy on Indonesian Stock Market," *Expert Journal of Economic*, Vol. 3, Issue 2, pp. 113-126, 2015.
- Hsing, Yu. "Effects of Fiscal Policy and Monetary Policy on the Stock Market in Poland," *Economies Journal*, 1, 19-25, 2013.
- Indarti, Iin dan Mulyani BR.P., Desti. "Analisis Perbandingan Harga Saham dan Volume Perdagangan Saham Sebelum dan Sesudah *Stock Split*," *Aset*, ISSN 1693-928X, Vol. 13 No. 1, 57-63, 2011.
- Jiwandono, Teguh. "Analisis Faktor Fundamental terhadap Harga Saham Sektor Perbankan yang Go Public di Indeks Kompas 100," *Jurnal Ilmu Manajemen I* vol. 2 no. 3, Juli 2014.
- Julian. "Dampak Gempa dan Tsunami Jepang terhadap Harga Saham di Bursa Efek Indonesia," *E-Jurnal Binar Akuntansi*, vol. 2, no. 1, ISSN 2303, 2013.
- Kangai GK, Mercy., Galo, Nebat., Wagala, Adolphus dan Kinyua M, James. "Stock Price and Volumes Reaction to Annual Earnings Announcement: A Case of the Nairobi Securities Exchange," *International Journal of Business, Humanities and Technology*, vol. 3, no. 2, 2013.
- Khan, Waseem A., dkk. "Impact of Macroeconomics variable on the Stock Market index; A Study from Pakistan," *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, vol. 4, no. 2, 2014.
- Kim, Oliver dan Verrecchia, Robert E. "Trading Volume and Price Reactions to Public Announcements," *Journal of Accounting Research*, vol. 29, no. 2, pp. 302-321, 1991.
- Leonard, Herman B dan Zeckhauser, Richard J. "Amnesty, Enforcement, and Tax Policy," *In Tax Policy and the Economy*, Lawrence Summers, ed, Cambridge University Press, ISBN: 0-262-19263-2, p. 55-86, 1987.
- MacKinlay, A. Craig. "Event Studies in Economic and Finance," *Journal of Economic Literature*, Vol. XXXV (March 1997).

- Mikesell, John L. dan Ross, Justin M. "Fast Money? The Contribution of State Tax Amnesties To Public Revenue Systems," *National Tax Journal*, 65 (3), 529–562. 2012.
- Mukarromah, Awwaliatul., Aeny, Suci Noor dan Megawati, Retno. "Pentingnya Peran Tax Amnesty di 2016." *Tax Research & Training Service*, Danny Darussalam Tax Center, 2016.
- Nar, Mehmet. "The Effect of Behavioral Economics on Tax Amnesty," *International Journal of Economics and Financial Issues*, 5(2), 580-589, 2015.
- Nurwanto. "Reaksi Pasar Modal Terhadap Peristiwa Bom Bali, Bom Makasar, dan Bom Mariot (Studi Kasus di BEJ dengan Proksi Saham-saham LQ45)." *Tesis tidak dipublikasikan*, Magister Manajemen Universitas Diponegoro, Semarang, 2004.
- Ogbulu, Onyemachi M., Torbira, Lezaasi L. dan Umezinwa, Chizoba L. "Assessment of the Impact of Fiscal Policy Operations on Stock Price Performance: Empirical Evidence from Nigeria," *International Journal of Financial Research*, vol. 6, no. 2, 2015.
- Pajula, Hardo dan Prohntichi, Valeriu. "Tax amnesty and zero-rate corporate income in Moldova: assessing the potential impact and risks." *Moldova: Public Administration and Good Governance Program*, 2007.
- Parle, William M. dan Hirlinger, Mike W. "Evaluating the Use of Tax Amnesty by State Governments." *Public Administration Review*, vol. 46, no. 3, pp. 246-255, 1986.
- Paultje, Novi. "Reaksi Pasar Modal terhadap Pengumuman Kabinet Baru (Saham-saham LQ-45 sebagai Proksi)." *Tesis tidak dipublikasikan*, Magister Manajemen Universitas Diponegoro, Semarang, 2001.
- Peterson, "Event Studies: A review of Issues and Metodology, Quaterly," *Journal of Business and Economic*, Summer, Vol. 28, No. 3, 1989.
- Rakhmindyarto. "Evaluating The Sunset Policy in Indonesia." *International Review of Social Sciences and Humanities*, Vol. 2, No. 1, 198-214. 2011.
- Ross, S. A. "The determination of financial structure: The incentive signaling structure," *Bell Journal of Economics*, 8: 23-40, 1977.
- Ross, Justin M. Dan Buckwalter, Neal D. "Strategic Tax Planing for State Tax Amnesties: Evidence From Eligibility Period Restrictions." *Public Finance Review*, 41 (3), 275-301, 2013.

- Sahalia, Yacine A. dkk. "Market response to policy initiatives during the global financial crisis," *Journal of International Economics*, 87, 162–177, 2012.
- Saracoglu, Osman Fatih Phd. "Tax Amnesty with Effects and Effecting Aspects: Tax Compliance, Tax Audits and Enforcements Around; The Turkish Case," *International Journal of Business and Social Science*. Vol. 2, no. 7, 2011.
- Sawyer, Adrian. "Targeting Amnesties an Ingrained Evasion-A New Zealand Initiative Warranting Wider Concideration?" *Journal of the Australasian Tax Teachers Association*, vol. 1, no. 3, 2005.
- Setyawan, St Tri Adi. "Analisis Reaksi Pasar Modal Terhadap Kenaikan Harga BBM (Studi Kasus: Di Bursa Efek Jakarta Untuk Saham-Saham LQ 45)." *Tesis tidak dipublikasikan*, Prodi Magister Manajemen Universitas Diponegoro Semarang, 2006.
- Siew, Kevin W.B. dkk. "The Effect of Government Policy on Stock Market Return in Malaysia." *A research project submitted in partial fulfillment of the requirement of the degree of Bacholor of Finance (Hons)*, *Universiti Tunku Abdul Rahman*, 2014.
- Somani, Samruddhi dan Kern, Holger. "The Effects of Government Policies on the Stock Market," *Undergraduate Research Journal*, University of South Carolina, 2015.
- Stella, Peter. "An Economic Analysis of Tax Amnesties," *Journal of Public Economic*, 46 (4), 383-400, 1991.
- Sun, Walter. "Relationship between Trading Volume and Security Prices and Returns." *MIT Laboratory for Information and Decision Systems Technical Report*, P-2638, 2003.
- Vigo, Arland. "Good Corporate Governance: Dampaknya terhadap Volume Transaksi Saham Harian dan Kinerja Keuangan Perusahaan Publik." *Tesis tidak dipublikasikan*, Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2005.
- Wang, Liya. "The Effect of Government Policy on China's Stock Market." *Dissertation of the University of St. Gallen, Graduate School of Business Administration, Economics, Law and Social Sciences (HSG)*, 2010.
- Wardiyanto, Bintoro. "Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty): Perspektif Kerangka Kerja Implementasi Sunset Policy mendasarkan UU No 28 tahun 2007," *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Th. XXI. No. 4, Universitas Airlangga, Oktober–Desember 2008, 328–335.

William H. Beaver, "The Information Content of Annual Earnings Announcement," *Journal of Accounting Research* 6, 1968.

WEB

Belajar Pajak. www.pajak.go.id. Diakses 22 Agustus 2016.

Cnn.Indonesia.com. "Siap-siap, Data Perbankan jadi Alat Incar Pajak Pada 2017." www.Cnn.Indonesia.com. Diakses 27 September 2016.

Daftar Harga Saham JII. www.duniainvestasi.com. Diakses 22 Agustus 2016.

Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu. www.pajak.go.id. Diakses 15 Agustus 2016.

Fatwa DSN MUI, Otoritas Jasa Keuangan. www.ojk.go.id. Diakses 15 Agustus 2016.

Indah, Reni. "Apa Sih Amnesti pajak?." www.kompasiana.com. Diakses 10 Agustus 2016.

P.H. Saham Bank Terangkat Tax Amnesty. www.Riauapos.com. Diakses 29 November 2016.

Putra, Eric P. "Persentase Umat Islam di Indonesia Jadi 85 Persen," www.Republika.co.id. Diakses 24 November 2016).

Reaksi Positif Pasar Usai Pengesahan UU Tax Amnesty. www.PresidenRI.go.id. Diakses 22 Agustus 2016.

Setiawan, Sakinah R.D. "Jumlah investor Pasar Modal Syariah Terus Meningkat," www.Kompas.com. Diakses 24 November 2016).

Simorangkir, Eduardo. "BEI: Ada Tax Amnesty, Pasar Modal RI Lebih Bergairah." www.pemeriksaanpajak.com. Diakses 23 September 2016.

Siregar, D. Ihsan. "Pasar Modal Belum Teraliri Dana Repatriasi Amnesti Pajak." [www.http://ekonomi.metrotvnews.com](http://ekonomi.metrotvnews.com). Diakses 28 September 2016.

Statistik Amnesti Pajak. www.pajak.go.id. Diakses 27 September 2016.

Sukmana, Yoga. "Awal September, Dana Repatriasi Tax Amnesty Rp 12,9 Triliun, Deklarasi Rp 195 Triliun." www.pengampunanpajak.com. Diakses 21 September 2016.

Taqiyah, Barratut. "BEI Operasikan Sistem JATS Next-G Kapasitas Baru." www.investasi.kontan.co.id (diakses 19 Agustus 2016).

Lampiran 1 Hasil Perhitungan

CODE	DAY	IHSG	RM	CP	R	AR	Volume	Saham beredar	TVA
AALI	-6	4971		14450					
AALI	-5	5069	0,019718	14100	-0,024221	-0,043940	5544200	1574745000	0,003521
AALI	-4	5100	0,006020	14250	0,010638	0,004619	3913000	1574745000	0,002485
AALI	-3	5134	0,006746	14475	0,015789	0,009044	2653100	1574745000	0,001685
AALI	-2	5084	-0,009816	14400	-0,005181	0,004635	1711200	1574745000	0,001087
AALI	-1	5110	0,005240	14800	0,027778	0,022537	4065700	1574745000	0,002582
AALI	0	5128	0,003390	15375	0,038851	0,035461	5026300	1574745000	0,003192
AALI	1	5173	0,008840	15150	-0,014634	-0,023475	2744800	1574745000	0,001743
AALI	2	5243	0,013531	15550	0,026403	0,012872	4072200	1574745000	0,002586
AALI	3	5217	-0,004931	15100	-0,028939	-0,024008	2056800	1574745000	0,001306
AALI	4	5197	-0,003780	15100	0,000000	0,003780	1339900	1574745000	0,000851
AALI	5	5221	0,004531	15200	0,006623	0,002091	971500	1574745000	0,000617
CODE	DAY	IHSG	RM	CP	R	AR	Volume	Saham beredar	TVA
ADRO	-6	4971		885					
ADRO	-5	5069	0,019718	925	0,045198	0,025480	122161400	31985962000	0,003819
ADRO	-4	5100	0,006020	970	0,048649	0,042629	120026800	31985962000	0,003752
ADRO	-3	5134	0,006746	1025	0,056701	0,049955	108673800	31985962000	0,003398
ADRO	-2	5084	-0,009816	1040	0,014634	0,024450	60585100	31985962000	0,001894
ADRO	-1	5110	0,005240	995	-0,043269	-0,048510	84782600	31985962000	0,002651
ADRO	0	5128	0,003390	1030	0,035176	0,031786	54946100	31985962000	0,001718
ADRO	1	5173	0,008840	1025	-0,004854	-0,013695	73371200	31985962000	0,002294
ADRO	2	5243	0,013531	1035	0,009756	-0,003775	71954300	31985962000	0,002250
ADRO	3	5217	-0,004931	1055	0,019324	0,024254	45179900	31985962000	0,001412
ADRO	4	5197	-0,003780	1050	-0,004739	-0,000959	52971200	31985962000	0,001656
ADRO	5	5221	0,004531	1070	0,019048	0,014516	57399500	31985962000	0,001795
CODE	DAY	IHSG	RM	CP	R	AR	Volume	Saham beredar	TVA
AKRA	-6	4971		6425					
AKRA	-5	5069	0,019718	6725	0,046693	0,026974	8675900	3851443500	0,002253
AKRA	-4	5100	0,006020	6650	-0,011152	-0,017172	6371000	3851443500	0,001654
AKRA	-3	5134	0,006746	6550	-0,015038	-0,021783	6440500	3851443500	0,001672
AKRA	-2	5084	-0,009816	6525	-0,003817	0,005999	5056900	3851443500	0,001313
AKRA	-1	5110	0,005240	6550	0,003831	-0,001409	5505000	3851443500	0,001429
AKRA	0	5128	0,003390	6725	0,026718	0,023328	8164500	3851443500	0,002120
AKRA	1	5173	0,008840	6800	0,011152	0,002312	7076100	3851443500	0,001837
AKRA	2	5243	0,013531	6775	-0,003676	-0,017207	6888500	3851443500	0,001789
AKRA	3	5217	-0,004931	6525	-0,036900	-0,031970	5465400	3851443500	0,001419
AKRA	4	5197	-0,003780	6725	0,030651	0,034432	4072900	3851443500	0,001057
AKRA	5	5221	0,004531	6900	0,026022	0,021491	5495100	3851443500	0,001427
CODE	DAY	IHSG	RM	CP	R	AR	Volume	Saham beredar	TVA
ASII	-6	4971		7400					
ASII	-5	5069	0,019718	7250	-0,020270	-0,039988	60681700	40483553140	0,001499
ASII	-4	5100	0,006020	7250	0,000000	-0,006020	47359700	40483553140	0,001170
ASII	-3	5134	0,006746	7275	0,003448	-0,003297	32802700	40483553140	0,000810
ASII	-2	5084	-0,009816	7100	-0,024055	-0,014239	45875000	40483553140	0,001133

ASII	-1	5110	0,005240	7100	0,000000	-0,005240	59396300	40483553140	0,001467
ASII	0	5128	0,003390	7250	0,021127	0,017737	48963100	40483553140	0,001209
ASII	1	5173	0,008840	7325	0,010345	0,001504	57681000	40483553140	0,001425
ASII	2	5243	0,013531	7450	0,017065	0,003534	49029600	40483553140	0,001211
ASII	3	5217	-0,004931	7375	-0,010067	-0,005137	35910000	40483553140	0,000887
ASII	4	5197	-0,003780	7350	-0,003390	0,000391	17475400	40483553140	0,000432
ASII	5	5221	0,004531	7500	0,020408	0,015877	45074900	40483553140	0,001113
CODE	DAY	IHSG	RM	CP	R	AR	Volume	Saham beredar	TVA
ASRI	-6	4971		476					
ASRI	-5	5069	0,019718	488	0,025210	0,005492	67017500	19649411888	0,003411
ASRI	-4	5100	0,006020	486	-0,004098	-0,010118	68057900	19649411888	0,003464
ASRI	-3	5134	0,006746	492	0,012346	0,005600	74570900	19649411888	0,003795
ASRI	-2	5084	-0,009816	492	0,000000	0,009816	128952900	19649411888	0,006563
ASRI	-1	5110	0,005240	484	-0,016260	-0,021500	58274000	19649411888	0,002966
ASRI	0	5128	0,003390	488	0,008264	0,004875	49570700	19649411888	0,002523
ASRI	1	5173	0,008840	488	0,000000	-0,008840	51482200	19649411888	0,002620
ASRI	2	5243	0,013531	492	0,008197	-0,005334	83095700	19649411888	0,004229
ASRI	3	5217	-0,004931	505	0,026423	0,031353	304828000	19649411888	0,015513
ASRI	4	5197	-0,003780	515	0,019802	0,023582	131692900	19649411888	0,006702
ASRI	5	5221	0,004531	505	-0,019417	-0,023949	93249700	19649411888	0,004746
CODE	DAY	IHSG	RM	CP	R	AR	Volume	Saham beredar	TVA
BSDE	-6	4971		2090					
BSDE	-5	5069	0,019718	2140	0,023923	0,004205	44589800	17496996592	0,002548
BSDE	-4	5100	0,006020	2110	-0,014019	-0,020038	33439900	17496996592	0,001911
BSDE	-3	5134	0,006746	2100	-0,004739	-0,011485	27526400	17496996592	0,001573
BSDE	-2	5084	-0,009816	2050	-0,023810	-0,013994	37843800	17496996592	0,002163
BSDE	-1	5110	0,005240	2000	-0,024390	-0,029631	27853200	17496996592	0,001592
BSDE	0	5128	0,003390	2050	0,025000	0,021610	30300300	17496996592	0,001732
BSDE	1	5173	0,008840	2000	-0,024390	-0,033231	42330400	17496996592	0,002419
BSDE	2	5243	0,013531	2060	0,030000	0,016469	47325500	17496996592	0,002705
BSDE	3	5217	-0,004931	2040	-0,009709	-0,004778	60452800	17496996592	0,003455
BSDE	4	5197	-0,003780	2030	-0,004902	-0,001122	18504700	17496996592	0,001058
BSDE	5	5221	0,004531	2080	0,024631	0,020099	19158700	17496996592	0,001095
CODE	DAY	IHSG	RM	CP	R	AR	Volume	Saham beredar	TVA
ICBP	-6	4971		16950					
ICBP	-5	5069	0,019718	17425	0,028024	0,008305	7198800	5830954000	0,001235
ICBP	-4	5100	0,006020	17400	-0,001435	-0,007454	5436400	5830954001	0,000932
ICBP	-3	5134	0,006746	17350	-0,002874	-0,009619	7299200	5830954002	0,001252
ICBP	-2	5084	-0,009816	17000	-0,020173	-0,010357	4925400	5830954003	0,000845
ICBP	-1	5110	0,005240	17000	0,000000	-0,005240	5359200	5830954004	0,000919
ICBP	0	5128	0,003390	16925	-0,004412	-0,007802	2570400	5830954005	0,000441
ICBP	1	5173	0,008840	17125	0,011817	0,002976	5331000	5830954006	0,000914
ICBP	2	5243	0,013531	8725	-0,490511	-0,504042	5846000	5830954007	0,001003
ICBP	3	5217	-0,004931	8600	-0,014327	-0,009396	4144400	5830954008	0,000711
ICBP	4	5197	-0,003780	8688	0,010174	0,013955	2197800	5830954009	0,000377
ICBP	5	5221	0,004531	8775	0,010072	0,005541	4023800	5830954010	0,000690

CODE	DAY	IHSG	RM	CP	R	AR	Volume	Saham beredar	TVA
INCO	-6	4971		1815					
INCO	-5	5069	0,019718	1950	0,074380	0,054662	19675700	9936338720	0,001980
INCO	-4	5100	0,006020	2210	0,133333	0,127314	60852800	9936338720	0,006124
INCO	-3	5134	0,006746	2410	0,090498	0,083752	56192400	9936338720	0,005655
INCO	-2	5084	-0,009816	2310	-0,041494	-0,031678	24317800	9936338720	0,002447
INCO	-1	5110	0,005240	2320	0,004329	-0,000911	15456800	9936338720	0,001556
INCO	0	5128	0,003390	2350	0,012931	0,009541	9171800	9936338720	0,000923
INCO	1	5173	0,008840	2470	0,051064	0,042223	29155500	9936338720	0,002934
INCO	2	5243	0,013531	2490	0,008097	-0,005434	8218600	9936338720	0,000827
INCO	3	5217	-0,004931	2500	0,004016	0,008947	15628000	9936338720	0,001573
INCO	4	5197	-0,003780	2580	0,032000	0,035780	27360200	9936338720	0,002754
INCO	5	5221	0,004531	2540	-0,015504	-0,020035	9738500	9936338720	0,000980
CODE	DAY	IHSG	RM	CP	R	AR	Volume	Saham beredar	TVA
INDF	-6	4971		7025					
INDF	-5	5069	0,019718	7200	0,024911	0,005193	12880400	8780426500	0,001467
INDF	-4	5100	0,006020	7200	0,000000	-0,006020	16340600	8780426500	0,001861
INDF	-3	5134	0,006746	7200	0,000000	-0,006746	8252500	8780426500	0,000940
INDF	-2	5084	-0,009816	7100	-0,013889	-0,004073	6913800	8780426500	0,000787
INDF	-1	5110	0,005240	7125	0,003521	-0,001719	5016900	8780426500	0,000571
INDF	0	5128	0,003390	7250	0,017544	0,014154	6442500	8780426500	0,000734
INDF	1	5173	0,008840	7550	0,041379	0,032539	26827200	8780426500	0,003055
INDF	2	5243	0,013531	7475	-0,009934	-0,023465	8201900	8780426500	0,000934
INDF	3	5217	-0,004931	7425	-0,006689	-0,001758	9914900	8780426500	0,001129
INDF	4	5197	-0,003780	7350	-0,010101	-0,006321	10552200	8780426500	0,001202
INDF	5	5221	0,004531	7400	0,006803	0,002271	6079500	8780426500	0,000692
CODE	DAY	IHSG	RM	CP	R	AR	Volume	Saham beredar	TVA
INTP	-6	4971		16425					
INTP	-5	5069	0,019718	17100	0,041096	0,021378	4278500	3681231699	0,001162
INTP	-4	5100	0,006020	16500	-0,035088	-0,041107	4080000	3681231699	0,001108
INTP	-3	5134	0,006746	17150	0,039394	0,032648	2888700	3681231699	0,000785
INTP	-2	5084	-0,009816	16900	-0,014577	-0,004761	1385900	3681231699	0,000376
INTP	-1	5110	0,005240	16750	-0,008876	-0,014116	1533600	3681231699	0,000417
INTP	0	5128	0,003390	16600	-0,008955	-0,012345	1596600	3681231699	0,000434
INTP	1	5173	0,008840	16600	0,000000	-0,008840	5863600	3681231699	0,001593
INTP	2	5243	0,013531	16800	0,012048	-0,001483	4419800	3681231699	0,001201
INTP	3	5217	-0,004931	16375	-0,025298	-0,020367	4514100	3681231699	0,001226
INTP	4	5197	-0,003780	16500	0,007634	0,011414	1420200	3681231699	0,000386
INTP	5	5221	0,004531	16600	0,006061	0,001529	884900	3681231699	0,000240
CODE	DAY	IHSG	RM	CP	R	AR	Volume	Saham beredar	TVA
JSMR	-6	4971		5150					
JSMR	-5	5069	0,019718	5375	0,043689	0,023971	9095300	6800000000	0,001338
JSMR	-4	5100	0,006020	5375	0,000000	-0,006020	9631000	6800000000	0,001416
JSMR	-3	5134	0,006746	5400	0,004651	-0,002095	8203200	6800000000	0,001206
JSMR	-2	5084	-0,009816	5375	-0,004630	0,005186	5557900	6800000000	0,000817
JSMR	-1	5110	0,005240	5550	0,032558	0,027318	19542400	6800000000	0,002874

JSMR	0	5128	0,003390	5475	-0,013514	-0,016903	3850800	6800000000	0,000566
JSMR	1	5173	0,008840	5550	0,013699	0,004858	5806100	6800000000	0,000854
JSMR	2	5243	0,013531	5550	0,000000	-0,013531	2869200	6800000000	0,000422
JSMR	3	5217	-0,004931	5450	-0,018018	-0,013087	2950400	6800000000	0,000434
JSMR	4	5197	-0,003780	5400	-0,009174	-0,005394	4889200	6800000000	0,000719
JSMR	5	5221	0,004531	5475	0,013889	0,009357	1965400	6800000000	0,000289
CODE	DAY	IHSG	RM	CP	R	AR	Volume	Saham beredar	TVA
KLBF	-6	4971		1515					
KLBF	-5	5069	0,019718	1605	0,059406	0,039688	118204700	10156014422	0,011639
KLBF	-4	5100	0,006020	1585	-0,012461	-0,018481	34464700	10156014422	0,003394
KLBF	-3	5134	0,006746	1590	0,003155	-0,003591	33488200	10156014422	0,003297
KLBF	-2	5084	-0,009816	1570	-0,012579	-0,002763	23742800	10156014422	0,002338
KLBF	-1	5110	0,005240	1570	0,000000	-0,005240	19053400	10156014422	0,001876
KLBF	0	5128	0,003390	1595	0,015924	0,012534	25175100	10156014422	0,002479
KLBF	1	5173	0,008840	1590	-0,003135	-0,011975	16813500	10156014422	0,001656
KLBF	2	5243	0,013531	1610	0,012579	-0,000952	20122300	10156014422	0,001981
KLBF	3	5217	-0,004931	1565	-0,027950	-0,023020	20272000	10156014422	0,001996
KLBF	4	5197	-0,003780	1595	0,019169	0,022950	17097000	10156014422	0,001683
KLBF	5	5221	0,004531	1665	0,043887	0,039356	27140100	10156014422	0,002672
CODE	DAY	IHSG	RM	CP	R	AR	Volume	Saham beredar	TVA
LPKR	-6	4971		1150					
LPKR	-5	5069	0,019718	1170	0,017391	-0,002327	86890200	23077689619	0,003765
LPKR	-4	5100	0,006020	1170	0,000000	-0,006020	57572500	23077689619	0,002495
LPKR	-3	5134	0,006746	1200	0,025641	0,018895	47875100	23077689619	0,002075
LPKR	-2	5084	-0,009816	1170	-0,025000	-0,015184	29967500	23077689619	0,001299
LPKR	-1	5110	0,005240	1170	0,000000	-0,005240	30028800	23077689619	0,001301
LPKR	0	5128	0,003390	1150	-0,017094	-0,020484	32815000	23077689619	0,001422
LPKR	1	5173	0,008840	1185	0,030435	0,021594	71332200	23077689619	0,003091
LPKR	2	5243	0,013531	1175	-0,008439	-0,021970	34325200	23077689619	0,001487
LPKR	3	5217	-0,004931	1155	-0,017021	-0,012091	36874800	23077689619	0,001598
LPKR	4	5197	-0,003780	1155	0,000000	0,003780	23995300	23077689619	0,001040
LPKR	5	5221	0,004531	1160	0,004329	-0,000202	27391700	23077689619	0,001187
CODE	DAY	IHSG	RM	CP	R	AR	Volume	Saham beredar	TVA
LPPF	-6	4971		19750					
LPPF	-5	5069	0,019718	20750	0,050633	0,030915	12253400	2917918080	0,004199
LPPF	-4	5100	0,006020	20800	0,002410	-0,003610	6316700	2917918080	0,002165
LPPF	-3	5134	0,006746	21275	0,022837	0,016091	5177700	2917918080	0,001774
LPPF	-2	5084	-0,009816	20825	-0,021152	-0,011336	6059100	2917918080	0,002077
LPPF	-1	5110	0,005240	21500	0,032413	0,027173	3724900	2917918080	0,001277
LPPF	0	5128	0,003390	20850	-0,030233	-0,033622	2205800	2917918080	0,000756
LPPF	1	5173	0,008840	20975	0,005995	-0,002845	2821400	2917918080	0,000967
LPPF	2	5243	0,013531	21050	0,003576	-0,009955	3091100	2917918080	0,001059
LPPF	3	5217	-0,004931	21000	-0,002375	0,002555	3644500	2917918080	0,001249
LPPF	4	5197	-0,003780	21000	0,000000	0,003780	935000	2917918080	0,000320
LPPF	5	5221	0,004531	21150	0,007143	0,002611	3464400	2917918080	0,001187
CODE	DAY	IHSG	RM	CP	R	AR	Volume	Saham beredar	TVA

LSIP	-6	4971		1375					
LSIP	-5	5069	0,019718	1350	-0,018182	-0,037900	23698900	6822863965	0,003473
LSIP	-4	5100	0,006020	1400	0,037037	0,031017	58840600	6822863965	0,008624
LSIP	-3	5134	0,006746	1405	0,003571	-0,003174	50775400	6822863965	0,007442
LSIP	-2	5084	-0,009816	1395	-0,007117	0,002698	22243400	6822863965	0,003260
LSIP	-1	5110	0,005240	1435	0,028674	0,023434	57073500	6822863965	0,008365
LSIP	0	5128	0,003390	1510	0,052265	0,048875	54271700	6822863965	0,007954
LSIP	1	5173	0,008840	1480	-0,019868	-0,028708	44509100	6822863965	0,006524
LSIP	2	5243	0,013531	1485	0,003378	-0,010153	37394200	6822863965	0,005481
LSIP	3	5217	-0,004931	1465	-0,013468	-0,008537	20962700	6822863965	0,003072
LSIP	4	5197	-0,003780	1465	0,000000	0,003780	7796300	6822863965	0,001143
LSIP	5	5221	0,004531	1460	-0,003413	-0,007944	11102500	6822863965	0,001627
CODE	DAY	IHSG	RM	CP	R	AR	Volume	Saham beredar	TVA
MIKA	-6	4971		1690					
MIKA	-5	5069	0,019718	2760	0,633136	0,613418	9950500	261913000	0,037992
MIKA	-4	5100	0,006020	2640	-0,043478	-0,049498	5797700	261913000	0,022136
MIKA	-3	5134	0,006746	2630	-0,003788	-0,010534	7657000	261913000	0,029235
MIKA	-2	5084	-0,009816	2540	-0,034221	-0,024405	8830800	261913000	0,033717
MIKA	-1	5110	0,005240	2600	0,023622	0,018382	6455900	261913000	0,024649
MIKA	0	5128	0,003390	2600	0,000000	-0,003390	3823600	261913000	0,014599
MIKA	1	5173	0,008840	2540	-0,023077	-0,031917	5697200	261913000	0,021752
MIKA	2	5243	0,013531	2580	0,015748	0,002217	12557500	261913000	0,047945
MIKA	3	5217	-0,004931	2540	-0,015504	-0,010573	3320200	261913000	0,012677
MIKA	4	5197	-0,003780	2540	0,000000	0,003780	5543700	261913000	0,021166
MIKA	5	5221	0,004531	2600	0,023622	0,019091	3951500	261913000	0,015087
CODE	DAY	IHSG	RM	CP	R	AR	Volume	Saham beredar	TVA
PGAS	-6	4971		2340					
PGAS	-5	5069	0,019718	2400	0,025641	0,005923	93543000	24241508196	0,003859
PGAS	-4	5100	0,006020	2520	0,050000	0,043980	111077800	24241508196	0,004582
PGAS	-3	5134	0,006746	2520	0,000000	-0,006746	92977500	24241508196	0,003835
PGAS	-2	5084	-0,009816	2510	-0,003968	0,005848	22517800	24241508196	0,000929
PGAS	-1	5110	0,005240	2660	0,059761	0,054521	117382800	24241508196	0,004842
PGAS	0	5128	0,003390	3100	0,165414	0,162024	307390400	24241508196	0,012680
PGAS	1	5173	0,008840	3000	-0,032258	-0,041098	235275700	24241508196	0,009705
PGAS	2	5243	0,013531	2930	-0,023333	-0,036864	67798600	24241508196	0,002797
PGAS	3	5217	-0,004931	2890	-0,013652	-0,008721	47859500	24241508196	0,001974
PGAS	4	5197	-0,003780	2970	0,027682	0,031462	107678600	24241508196	0,004442
PGAS	5	5221	0,004531	2970	0,000000	-0,004531	56147300	24241508196	0,002316
CODE	DAY	IHSG	RM	CP	R	AR	Volume	Saham beredar	TVA
PTBA	-6	4971		7900					
PTBA	-5	5069	0,019718	8275	0,047468	0,027750	5822200	2304131850	0,002527
PTBA	-4	5100	0,006020	8625	0,042296	0,036276	7253000	2304131850	0,003148
PTBA	-3	5134	0,006746	9650	0,118841	0,112095	12599500	2304131850	0,005468
PTBA	-2	5084	-0,009816	9325	-0,033679	-0,023863	3899000	2304131850	0,001692
PTBA	-1	5110	0,005240	9625	0,032172	0,026931	2911700	2304131850	0,001264
PTBA	0	5128	0,003390	10000	0,038961	0,035571	3807600	2304131850	0,001653

PTBA	1	5173	0,008840	9800	-0,020000	-0,028840	5679400	2304131850	0,002465
PTBA	2	5243	0,013531	10000	0,020408	0,006877	5459800	2304131850	0,002370
PTBA	3	5217	-0,004931	9725	-0,027500	-0,022569	2690800	2304131850	0,001168
PTBA	4	5197	-0,003780	9675	-0,005141	-0,001361	3081200	2304131850	0,001337
PTBA	5	5221	0,004531	10050	0,038760	0,034228	4951400	2304131850	0,002149
CODE	DAY	IHSG	RM	CP	R	AR	Volume	Saham beredar	TVA
PTPP	-6	4971		3810					
PTPP	-5	5069	0,019718	3900	0,023622	0,003904	7830000	4842436500	0,001617
PTPP	-4	5100	0,006020	3900	0,000000	-0,006020	10912200	4842436500	0,002253
PTPP	-3	5134	0,006746	3860	-0,010256	-0,017002	7346100	4842436500	0,001517
PTPP	-2	5084	-0,009816	3800	-0,015544	-0,005728	8475400	4842436500	0,001750
PTPP	-1	5110	0,005240	3780	-0,005263	-0,010503	5341400	4842436500	0,001103
PTPP	0	5128	0,003390	3810	0,007937	0,004547	3216500	4842436500	0,000664
PTPP	1	5173	0,008840	3900	0,023622	0,014782	18338300	4842436500	0,003787
PTPP	2	5243	0,013531	3990	0,023077	0,009546	11170700	4842436500	0,002307
PTPP	3	5217	-0,004931	4080	0,022556	0,027487	20893800	4842436500	0,004315
PTPP	4	5197	-0,003780	3970	-0,026961	-0,023180	6506500	4842436500	0,001344
PTPP	5	5221	0,004531	3960	-0,002519	-0,007050	4984300	4842436500	0,001029
CODE	DAY	IHSG	RM	CP	R	AR	Volume	Saham beredar	TVA
PWON	-6	4971		605					
PWON	-5	5069	0,019718	635	0,049587	0,029869	114185500	48159602400	0,002371
PWON	-4	5100	0,006020	660	0,039370	0,033350	131126900	48159602400	0,002723
PWON	-3	5134	0,006746	655	-0,007576	-0,014321	42885700	48159602400	0,000890
PWON	-2	5084	-0,009816	645	-0,015267	-0,005451	125980300	48159602400	0,002616
PWON	-1	5110	0,005240	630	-0,023256	-0,028496	86366500	48159602400	0,001793
PWON	0	5128	0,003390	625	-0,007937	-0,011326	50175100	48159602400	0,001042
PWON	1	5173	0,008840	625	0,000000	-0,008840	88320100	48159602400	0,001834
PWON	2	5243	0,013531	635	0,016000	0,002469	79268400	48159602400	0,001646
PWON	3	5217	-0,004931	630	-0,007874	-0,002943	101322700	48159602400	0,002104
PWON	4	5197	-0,003780	640	0,015873	0,019653	63263200	48159602400	0,001314
PWON	5	5221	0,004531	635	-0,007813	-0,012344	27757800	48159602400	0,000576
CODE	DAY	IHSG	RM	CP	R	AR	Volume	Saham beredar	TVA
SCMA	-6	4971		3220					
SCMA	-5	5069	0,019718	3280	0,018634	-0,001085	12639000	1921556030	0,006577
SCMA	-4	5100	0,006020	3290	0,003049	-0,002971	6605900	1921556030	0,003438
SCMA	-3	5134	0,006746	3290	0,000000	-0,006746	10942600	1921556030	0,005695
SCMA	-2	5084	-0,009816	3280	-0,003040	0,006776	6381300	1921556030	0,003321
SCMA	-1	5110	0,005240	3200	-0,024390	-0,029631	8517100	1921556030	0,004432
SCMA	0	5128	0,003390	3190	-0,003125	-0,006515	7395400	1921556030	0,003849
SCMA	1	5173	0,008840	3200	0,003135	-0,005706	8970100	1921556030	0,004668
SCMA	2	5243	0,013531	3190	-0,003125	-0,016656	5448300	1921556030	0,002835
SCMA	3	5217	-0,004931	3200	0,003135	0,008065	6059900	1921556030	0,003154
SCMA	4	5197	-0,003780	3170	-0,009375	-0,005595	5386000	1921556030	0,002803
SCMA	5	5221	0,004531	3270	0,031546	0,027014	4928700	1921556030	0,002565
CODE	DAY	IHSG	RM	CP	R	AR	Volume	Saham beredar	TVA
SILO	-6	4971		11450					

SILO	-5	5069	0,019718	11250	-0,017467	-0,037185	2889700	156100000	0,018512
SILO	-4	5100	0,006020	11000	-0,022222	-0,028242	2320600	156100000	0,014866
SILO	-3	5134	0,006746	11100	0,009091	0,002345	3323400	156100000	0,021290
SILO	-2	5084	-0,009816	11000	-0,009009	0,000807	4105000	156100000	0,026297
SILO	-1	5110	0,005240	11050	0,004545	-0,000695	4216200	156100000	0,027010
SILO	0	5128	0,003390	11300	0,022624	0,019235	4181300	156100000	0,026786
SILO	1	5173	0,008840	11000	-0,026549	-0,035389	4427100	156100000	0,028361
SILO	2	5243	0,013531	11000	0,000000	-0,013531	2172100	156100000	0,013915
SILO	3	5217	-0,004931	10525	-0,043182	-0,038251	754700	156100000	0,004835
SILO	4	5197	-0,003780	10600	0,007126	0,010906	1629600	156100000	0,010439
SILO	5	5221	0,004531	10550	-0,004717	-0,009248	359900	156100000	0,002306
CODE	DAY	IHSG	RM	CP	R	AR	Volume	Saham beredar	TVA
SMGR	-6	4971		9250					
SMGR	-5	5069	0,019718	9675	0,045946	0,026228	12587300	5931520000	0,002122
SMGR	-4	5100	0,006020	9825	0,015504	0,009484	10268700	5931520000	0,001731
SMGR	-3	5134	0,006746	9525	-0,030534	-0,037280	12633600	5931520000	0,002130
SMGR	-2	5084	-0,009816	9275	-0,026247	-0,016431	12688900	5931520000	0,002139
SMGR	-1	5110	0,005240	9050	-0,024259	-0,029499	22723300	5931520000	0,003831
SMGR	0	5128	0,003390	8975	-0,008287	-0,011677	38194500	5931520000	0,006439
SMGR	1	5173	0,008840	9525	0,061281	0,052441	74130700	5931520000	0,012498
SMGR	2	5243	0,013531	9500	-0,002625	-0,016156	29152100	5931520000	0,004915
SMGR	3	5217	-0,004931	9425	-0,007895	-0,002964	10960300	5931520000	0,001848
SMGR	4	5197	-0,003780	9300	-0,013263	-0,009482	9598800	5931520000	0,001618
SMGR	5	5221	0,004531	9400	0,010753	0,006221	11918500	5931520000	0,002009
CODE	DAY	IHSG	RM	CP	R	AR	Volume	Saham beredar	TVA
SMRA	-6	4971		1810					
SMRA	-5	5069	0,019718	1855	0,024862	0,005144	36085500	6873140840	0,005250
SMRA	-4	5100	0,006020	1880	0,013477	0,007457	23839100	6873140840	0,003468
SMRA	-3	5134	0,006746	1885	0,002660	-0,004086	18447700	6873140840	0,002684
SMRA	-2	5084	-0,009816	1820	-0,034483	-0,024667	20719700	6873140840	0,003015
SMRA	-1	5110	0,005240	1805	-0,008242	-0,013482	15868700	6873140840	0,002309
SMRA	0	5128	0,003390	1805	0,000000	-0,003390	6449500	6873140840	0,000938
SMRA	1	5173	0,008840	1735	-0,038781	-0,047622	39036800	6873140840	0,005680
SMRA	2	5243	0,013531	1790	0,031700	0,018169	53652600	6873140840	0,007806
SMRA	3	5217	-0,004931	1730	-0,033520	-0,028589	53436100	6873140840	0,007775
SMRA	4	5197	-0,003780	1730	0,000000	0,003780	22615700	6873140840	0,003290
SMRA	5	5221	0,004531	1765	0,020231	0,015700	17274900	6873140840	0,002513
CODE	DAY	IHSG	RM	CP	R	AR	Volume	Saham beredar	TVA
SMSS	-6	4971		1900					
SMSS	-5	5069	0,019718	1875	-0,013158	-0,032876	47179300	1500000000	0,031453
SMSS	-4	5100	0,006020	1875	0,000000	-0,006020	26991800	1500000000	0,017995
SMSS	-3	5134	0,006746	1890	0,008000	0,001254	21514500	1500000000	0,014343
SMSS	-2	5084	-0,009816	1865	-0,013228	-0,003412	28534200	1500000000	0,019023
SMSS	-1	5110	0,005240	1840	-0,013405	-0,018645	51962100	1500000000	0,034641
SMSS	0	5128	0,003390	1865	0,013587	0,010197	43034100	1500000000	0,028689
SMSS	1	5173	0,008840	1855	-0,005362	-0,014202	29505300	1500000000	0,019670

SMSS	2	5243	0,013531	1840	-0,008086	-0,021617	43419500	1500000000	0,028946
SMSS	3	5217	-0,004931	1795	-0,024457	-0,019526	33716300	1500000000	0,022478
SMSS	4	5197	-0,003780	1790	-0,002786	0,000995	46521600	1500000000	0,031014
SMSS	5	5221	0,004531	1790	0,000000	-0,004531	55280900	1500000000	0,036854
CODE	DAY	IHSG	RM	CP	R	AR	Volume	Saham beredar	TVA
TLKM	-6	4971		3970					
TLKM	-5	5069	0,019718	4070	0,025189	0,005471	270804800	20159999280	0,013433
TLKM	-4	5100	0,006020	4100	0,007371	0,001351	143787700	20159999280	0,007132
TLKM	-3	5134	0,006746	4260	0,039024	0,032279	95845300	20159999280	0,004754
TLKM	-2	5084	-0,009816	4110	-0,035211	-0,025395	131505700	20159999280	0,006523
TLKM	-1	5110	0,005240	4200	0,021898	0,016658	109258400	20159999280	0,005420
TLKM	0	5128	0,003390	4140	-0,014286	-0,017676	53918600	20159999280	0,002675
TLKM	1	5173	0,008840	4160	0,004831	-0,004009	73777600	20159999280	0,003660
TLKM	2	5243	0,013531	4190	0,007212	-0,006319	47233600	20159999280	0,002343
TLKM	3	5217	-0,004931	4120	-0,016706	-0,011776	69990500	20159999280	0,003472
TLKM	4	5197	-0,003780	4110	-0,002427	0,001353	49795000	20159999280	0,002470
TLKM	5	5221	0,004531	4180	0,017032	0,012500	53817300	20159999280	0,002670
CODE	DAY	IHSG	RM	CP	R	AR	Volume	Saham beredar	TVA
UNTR	-6	4971		14800					
UNTR	-5	5069	0,019718	15075	0,018581	-0,001137	14920600	2851609100	0,005232
UNTR	-4	5100	0,006020	15500	0,028192	0,022173	7068800	2851609100	0,002479
UNTR	-3	5134	0,006746	16150	0,041935	0,035190	13008700	2851609100	0,004562
UNTR	-2	5084	-0,009816	15600	-0,034056	-0,024240	6524900	2851609100	0,002288
UNTR	-1	5110	0,005240	15500	-0,006410	-0,011651	3576800	2851609100	0,001254
UNTR	0	5128	0,003390	16000	0,032258	0,028868	5480200	2851609100	0,001922
UNTR	1	5173	0,008840	16200	0,012500	0,003660	8258200	2851609100	0,002896
UNTR	2	5243	0,013531	16000	-0,012346	-0,025877	8189700	2851609100	0,002872
UNTR	3	5217	-0,004931	15900	-0,006250	-0,001319	2220100	2851609100	0,000779
UNTR	4	5197	-0,003780	15850	-0,003145	0,000636	2434300	2851609100	0,000854
UNTR	5	5221	0,004531	16000	0,009464	0,004932	2630400	2851609100	0,000922
CODE	DAY	IHSG	RM	CP	R	AR	Volume	Saham beredar	TVA
UNVR	-6	4971		43800					
UNVR	-5	5069	0,019718	45000	0,027397	0,007679	3228200	7630000000	0,000423
UNVR	-4	5100	0,006020	44325	-0,015000	-0,021020	2611000	7630000000	0,000342
UNVR	-3	5134	0,006746	44950	0,014100	0,007355	1650000	7630000000	0,000216
UNVR	-2	5084	-0,009816	44300	-0,014461	-0,004645	2137900	7630000000	0,000280
UNVR	-1	5110	0,005240	44500	0,004515	-0,000726	2367300	7630000000	0,000310
UNVR	0	5128	0,003390	43900	-0,013483	-0,016873	2762800	7630000000	0,000362
UNVR	1	5173	0,008840	44150	0,005695	-0,003146	2059900	7630000000	0,000270
UNVR	2	5243	0,013531	44475	0,007361	-0,006170	1532900	7630000000	0,000201
UNVR	3	5217	-0,004931	44400	-0,001686	0,003244	2788300	7630000000	0,000365
UNVR	4	5197	-0,003780	44025	-0,008446	-0,004666	1559100	7630000000	0,000204
UNVR	5	5221	0,004531	44700	0,015332	0,010801	1554900	7630000000	0,000204
CODE	DAY	IHSG	RM	CP	R	AR	Volume	Saham beredar	TVA
WIKA	-6	4971		2880					
WIKA	-5	5069	0,019718	2850	-0,010417	-0,030135	10201500	6004003500	0,001699

WIKA	-4	5100	0,006020	2860	0,003509	-0,002511	9532200	6004003500	0,001588
WIKA	-3	5134	0,006746	2860	0,000000	-0,006746	9100200	6004003500	0,001516
WIKA	-2	5084	-0,009816	2850	-0,003497	0,006319	14850900	6004003500	0,002473
WIKA	-1	5110	0,005240	2870	0,007018	0,001777	5667700	6004003500	0,000944
WIKA	0	5128	0,003390	2880	0,003484	0,000094	8734800	6004003500	0,001455
WIKA	1	5173	0,008840	2860	-0,006944	-0,015785	8766900	6004003500	0,001460
WIKA	2	5243	0,013531	2860	0,000000	-0,013531	7568300	6004003500	0,001261
WIKA	3	5217	-0,004931	2860	0,000000	0,004931	11048200	6004003500	0,001840
WIKA	4	5197	-0,003780	2860	0,000000	0,003780	2751100	6004003500	0,000458
WIKA	5	5221	0,004531	2860	0,000000	-0,004531	6643500	6004003500	0,001107
CODE	DAY	IHSG	RM	CP	R	AR	Volume	Saham beredar	TVA
WSKT	-6	4971		2500					
WSKT	-5	5069	0,019718	2570	0,028000	0,008282	45091900	13567473560	0,003324
WSKT	-4	5100	0,006020	2550	-0,007782	-0,013802	32595400	13567473560	0,002402
WSKT	-3	5134	0,006746	2590	0,015686	0,008941	58167200	13567473560	0,004287
WSKT	-2	5084	-0,009816	2730	0,054054	0,063870	133585600	13567473560	0,009846
WSKT	-1	5110	0,005240	2730	0,000000	-0,005240	47190700	13567473560	0,003478
WSKT	0	5128	0,003390	2700	-0,010989	-0,014379	23864900	13567473560	0,001759
WSKT	1	5173	0,008840	2720	0,007407	-0,001433	35045900	13567473560	0,002583
WSKT	2	5243	0,013531	2760	0,014706	0,001175	36844700	13567473560	0,002716
WSKT	3	5217	-0,004931	2710	-0,018116	-0,013185	23809400	13567473560	0,001755
WSKT	4	5197	-0,003780	2710	0,000000	0,003780	30903200	13567473560	0,002278
WSKT	5	5221	0,004531	2710	0,000000	-0,004531	20859000	13567473560	0,001537

Lampiran 2 Hasil Uji SPSS 23

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
AR	10	-,02336	,02511	,0004771	,00398486	,01260123
AAR	10	-,00078	,00084	,0000159	,00013283	,00042004
CAAR	10	,00011	,00121	,0007420	,00012384	,00039160
TVA	10	,00314	,00612	,0045571	,00028683	,00090704
ATVA	10	,00010	,00020	,0001519	,00000956	,00003023
Valid N (listwise)	10					

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		AAR_Sebelum	AAR_Sesudah
N		5	5
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,005940	-,005020
	Std. Deviation	,0117757	,0119897
Most Extreme Differences	Absolute	,221	,241
	Positive	,221	,179
	Negative	-,192	-,241
Test Statistic		,221	,241
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}	,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

T-Test

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
AR1	30	,025112	,1139214	,0207991
AR2	30	,002917	,0325719	,0059468
AR3	30	,008624	,0304840	,0055656
AR4	30	-,004341	,0182961	,0033404
AR5	30	-,001900	,0221598	,0040458
AR6	30	-,006357	,0232985	,0042537
AR7	30	-,023356	,0917063	,0167432
AR8	30	-,006791	,0164993	,0030123
AR9	30	,004404	,0166196	,0030343

AR10	30	,005544	,0147956	,0027013
------	----	---------	----------	----------

One-Sample Test

	Test Value = 0					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
AR1	1.207	29	.237	,0251119	-,017427	,067651
AR2	.491	29	.627	,0029169	-,009246	,015079
AR3	1.549	29	.132	,0086239	-,002759	,020007
AR4	-1.299	29	.204	-,0043406	-,011172	,002491
AR5	-.470	29	.642	-,0018998	-,010174	,006375
AR6	-1.494	29	.146	-,0063569	-,015057	,002343
AR7	-1.395	29	.174	-,0233564	-,057600	,010887
AR8	-2.254	29	.032	-,0067911	-,012952	-,000630
AR9	1.451	29	.157	,0044041	-,001802	,010610
AR10	2.052	29	.049	,0055443	,000020	,011069

T-Test

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
AAR	10	,000460	,0126050	,0039861

One-Sample Test

	Test Value = 0					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
AAR	.115	9	.911	,0004600	-,008557	,009477

T-Test

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 AAR_Sebelum	,005940	5	,0117757	,0052663
AAR_Sesudah	-,005020	5	,0119897	,0053619

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.

Pair 1	AAR_Sebelum & AAR_Sesudah	5	-.309	.613
--------	------------------------------	---	-------	------

Paired Samples Test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	AAR_Sebelum - AAR_Sesudah	,0109600	,0192242	,0085973	-,0129099	,0348299	1.275	4	.271

T-Test

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	CAAR_sebelum	,03025575	5	,004248245	,001899873
	CAAR_sesudah	-,02561215	5	,011518201	,005151096

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	CAAR_sebelum & CAAR_sesudah	5	-.846	.071

Paired Samples Test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	CAAR_sebelum - CAAR_sesudah	,0558679	,0152798	,0068333	,0368954	,0748403	8.176	4	.001

T-Test

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	ATVA_sebelum	,004998	5	,0006599	,0002951

ATVA_sesudah	,004116	5	,0009638	,0004310
--------------	---------	---	----------	----------

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 ATVA_sebelum & ATVA_sesudah	5	.363	.548

Paired Samples Test

	Paired Differences	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
					Lower	Upper			
					Pair 1 ATVA_sebelum - ATVA_sesudah	,0008825			

Lampiran 3: Daftar Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil
1	Bamber dan Cheon (1995)	Differential price and volume reactions to accounting earnings announcements	<ul style="list-style-type: none"> - adanya tingkat penjualan yang tinggi namun dengan perubahan harga saham yang rendah; - adanya perubahan harga saham yang tinggi namun volume penjualan yang rendah.
2	Paultje (2001)	Reaksi Pasar Modal terhadap Pengumuman Kabinet Baru	<ul style="list-style-type: none"> - Pasar modal di Indonesia tidak efisien secara informasi karena terdapat <i>abnormal return</i> berkepanjangan setelah pengumuman; - terdapat perbedaan <i>abnormal return</i> yang signifikan pada sebelum dan sesudah pengumuman; - tidak terdapat perubahan yang signifikan volume aktifitas perdagangan pada sebelum dan sesudah pengumuman.
3	Borgne (2006)	Economic and Political Determinants of Tax Amnesties oin The us States	<ul style="list-style-type: none"> - 50 persen kemungkinan terjadinya kebijakan amnesti pajak saat adanya peristiwa pemilu; - bukan hanya politik yang menjadi faktor kebijakan amnesti pajak melainkan juga faktor ekonomi yaitu sebagai sumber peningkatan pendapatan negara.
4	Setyawan (2006)	Analisis Reaksi Pasar Modal Terhadap Kenaikan Harga BBM (Studi Kasus: Di Bursa Efek Jakarta Untuk Saham-Saham LQ 45)	<ul style="list-style-type: none"> - Pada hari-hari di seputar pengumuman tidak terdapat perbedaan hasil yang signifikan baik pada <i>abnormal return</i> maupun total volume perdagangan; - tidak adanya perbedaan <i>abnormal return</i> antara sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM; - terdapat perbedaan reaksi dimana sebelum kenaikan harga BBM cenderung reaksi negatif dan setelah kenaikan terdapat reaksi

			positif dari investor.
5	Chatziantoniou, Duffy dan Filis (2013)	Stock Market Response to Monetary and Fiscal Policy Shocks: Multi-Country Evidence	<ul style="list-style-type: none"> - UK: <i>Government Expenditure, interest rate</i> berpengaruh positif terhadap pasar saham, namun GDP tidak berpengaruh signifikan terhadap pasar saham; - Germany: Pasar saham merespon positif pertumbuhan jumlah uang beredar, namun tidak merespon <i>government expenditure. Interest rates</i> juga tidak mempengaruhi pasar saham Jerman; - US: jumlah uang beredar memberikan pengaruh negatif bagi <i>interest rate</i>, kemudian memberikan efek negatif pula bagi pasar saham.
6	Khan dkk. (2014)	Impact of Macroeconomics variable on the Stock Market index; A Study from Pakistan	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Interest rate</i> dan <i>Government revenue</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks pasar saham di Pakistan; - <i>Inflation rate</i> dan <i>Government expenditure</i> berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pasar saham di Pakistan.
7	Bayer (2014)	The Occurrence of Tax Amnesties: Theory and Evidence	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya peningkatan kepatuhan pajak setelah kebijakan amnesti pajak di Amerika Serikat tahun 1981 dan tahun 2011; - Bertambahnya penerimaan negara secara singkat.
8	Somani dan Kern (2015)	The Effects of Government Policies on the Stock Market	Penurunan suku bunga dana federal menjadi cara paling praktis bagi pemerintah untuk meningkatkan harga saham.
9	Handoyo, Jusoh, dan Zaidi, (2015)	Impact Monetary Policy and Fiscal Policy on Indonesian Stock Market.	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan moneter: dalam jangka pendek direspon positif oleh harga saham, namun direspon negative pada jangka menengah dan jangka panjang. (Harga saham lambat merespon kebijakan moneter); - Kebijakan fiskal: berpengaruh negatif terhadap harga saham; - Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal secara bersama-sama

			berpengaruh negatif terhadap perkembangan kinerja pasar saham.
10	Ogbulu, Torbira dan Umezinwa (2015)	Assessment of the Impact of Fiscal Policy Operations on Stock Price Performance: Empirical Evidence from Nigeria	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil regresi multivariat menemukan bahwa <i>Public Expenditure</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap harga saham; - <i>Government Domestic Debt Outstanding</i> berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham; - <i>Non-Oil Revenue</i> berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham; - Jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap harga saham; - Tes kausalitas Granger menunjukkan bahwa <i>Public Expenditure, Domestic Debt, Money Supply</i> dan <i>Non-Oil Revenue leads</i> dapat mengubah harga saham.
11	Nar (2015)	The Effect of Behavioral Economics on Tax Amnesty	Aspek psikologis mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi.

Lampiran 4 Hasil Wawancara Bursa Efek Indonesia

BERITA WAWANCARA

Nama : Irfan Noor Riza
Jabatan : Head of IDX Representative Office-Yogyakarta Education Division
Tempat : BEI Kantor Cabang Yogyakarta
Hari/Tanggal : Selasa, 13 September 2016

Pokok Pembicaraan:

1. Bagaimana kesiapan BEI dalam menerima dana repatriasi?

Jawab : BEI sejak awal sudah digandeng oleh pemerintah secara langsung dalam hal ini oleh Dirjen Pajak untuk mensukseskan kebijakan amnesti pajak. BEI sebagai salah satu dari tiga pintu penampung dana repatriasi tentunya menyiapkan berbagai instrumen investasi, seperti reksa dana, sukuk, obligasi, dll. BEI juga memberikan fasilitas khusus bagi investor dana repatriasi seperti, pemberian diskon bagi pemegang saham yang ingin melakukan balik nama melalui skema crossing saham, kemudian ditiadakannya tender offer, dan potongan harga biaya pencatatan saham perdana.

2. Sejauh ini, berapa perkiraan dana yang sudah masuk ke pasar modal syariah setelah kebijakan amnesti pajak?

Jawab : Belum ada data pasti dari BEI pusat, dana repatriasi yang sudah masuk ke BEI akan di evaluasi pada akhir periode pertama yaitu pada bulan September 2016.

3. Instrumen-instrumen apa saja yang menarik investor di pasar modal syariah?

Jawab : Reksa Dana Syariah masih menjadi primadona di instrumen Pasar Modal Syariah, diikuti saham syariah, sukuk, dan obligasi syariah.

4. Sejauh ini, bagaimana perkembangan pasar modal syariah setelah kebijakan amnesti pajak?

Jawab : saat ini investor lebih tertarik pada saham perbankan, sehingga instrumen pasar modal syariah yang tidak terdapat saham perbankan tidak mengalami perubahan yang signifikan.

5. Apakah ada upaya BEI mensosialisasikan kebijakan amnesti pajak?

Jawab : Sejak pertama kali kebijakan amnesti pajak berlaku, BEI sudah ikut mensosialisasikan kebijakan ini bersama Pemerintah tentunya.

6. Bagaimana bentuk sosialisasi kebijakan amnesti pajak dari BEI?

Jawab : Beberapa upaya sosialisasi yang dilakukan BEI adalah dengan mengundang para investor, pengusaha, Forum-forum mahasiswa seperti Fossei, MES, dengan mendatangkan pembicara dari pihak Dirjen Pajak.

7. Bagaimana komitmen pasar modal syariah di Indonesia terhadap dana yang masuk hingga periode terakhir amnesti pajak pada maret 2017?

Jawab : Perlu diakui bahwa optimisme Menteri Keuangan terlalu berlebihan, sejauh ini perkiraan dana repatriasi yang masuk hanya Rp2,1 T dari target Rp1.000 T. Namun kebijakan ini masih terus berjalan hingga Maret 2017, tentunya setiap akhir periode akan dilakukan evaluasi dan terus memaksimalkan sosialisasi.



PENGUMUMAN
Perubahan Komposisi Saham dalam Penghitungan
Jakarta Islamic Index
No.: Peng-00301/BEI.OPP/05-2016
(dapat dilihat di website: <http://www.idx.co.id>)

Menunjuk Pengumuman PT Bursa Efek Indonesia No. Peng-18/BEJ-DAG/U/06-2000 tanggal 28 Juni 2000 tentang "Jakarta Islamic Index (JII)", dengan ini diumumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah dilakukan evaluasi periodik enam bulanan terhadap 30 emiten yang masuk dalam penghitungan JII yang diseleksi dari daftar saham atau efek syariah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat 2 (dua) saham baru yang masuk ke dalam penghitungan JII, yaitu:

No.	Kode	Nama Saham
1.	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.
2.	SCMA	Surya Citra Media Tbk.

Dua saham di atas menggantikan saham berikut:

No.	Kode	Nama Saham
1.	MPPA	Matahari Putra Prima Tbk.
2.	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.

3. Terlampir adalah daftar saham yang masuk dalam Daftar Penghitungan JII dan mulai diberlakukan tanggal **1 Juni 2016** atau sampai dengan *review* Daftar Efek Syariah (DES) berikutnya oleh OJK. Daftar saham JII tersebut menggantikan daftar saham JII yang tercantum dalam pengumuman PT Bursa Efek Indonesia No. Peng-00955/BEI.OPP/11-2015 tanggal 27 November 2015.

Demikian untuk diketahui.

27 Mei 2016,

Yayuk Sri Wahyuni

P.H. Kepala Operasional Perdagangan



Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia

Heidy Ruswita Sari

P.H. Kepala Riset dan Pengembangan

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
2. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan
3. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
4. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
5. PT Indonesia Capital Market Electronic Library (ICAMEL)
6. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia
7. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia



Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia

Daftar Saham yang Masuk dalam Penghitungan Jakarta Islamic Index (JII) Periode Juni s.d. November 2016

(Lampiran Pengumuman No.: Peng-00301/BEI.OPP/05-2016 tanggal 27 Mei 2016)

No.	Kode	Nama Saham	Keterangan
1.	AALI	Astra Agro Lestari Tbk.	Tetap
2.	ADRO	Adaro Energy Tbk.	Tetap
3.	AKRA	AKR Corporindo Tbk.	Tetap
4.	ASII	Astra International Tbk.	Tetap
5.	ASRI	Alam Sutera Realty Tbk.	Tetap
6.	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk.	Tetap
7.	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	Tetap
8.	INCO	Vale Indonesia Tbk.	Tetap
9.	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.	Tetap
10.	INTP	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.	Tetap
11.	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk.	Tetap
12.	KLBF	Kalbe Farma Tbk.	Tetap
13.	LPKR	Lippo Karawaci Tbk.	Tetap
14.	LPPF	Matahari Department Store Tbk.	Tetap
15.	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk.	Tetap
16.	MIKA	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.	Tetap
17.	PGAS	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.	Tetap
18.	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.	Baru
19.	PTPP	PP (Persero) Tbk.	Tetap
20.	PWON	Pakuwon Jati Tbk.	Tetap
21.	SCMA	Surya Citra Media Tbk.	Baru
22.	SILO	Siloam International Hospitals Tbk.	Tetap
23.	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
24.	SMRA	Summarecon Agung Tbk.	Tetap
25.	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk.	Tetap
26.	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
27.	UNTR	United Tractors Tbk.	Tetap
28.	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.	Tetap
29.	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk.	Tetap
30.	WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk.	Tetap



Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia

**Daftar Saham yang Keluar dari Penghitungan Jakarta Islamic Index (JII)
Periode Juni s.d. November 2016**

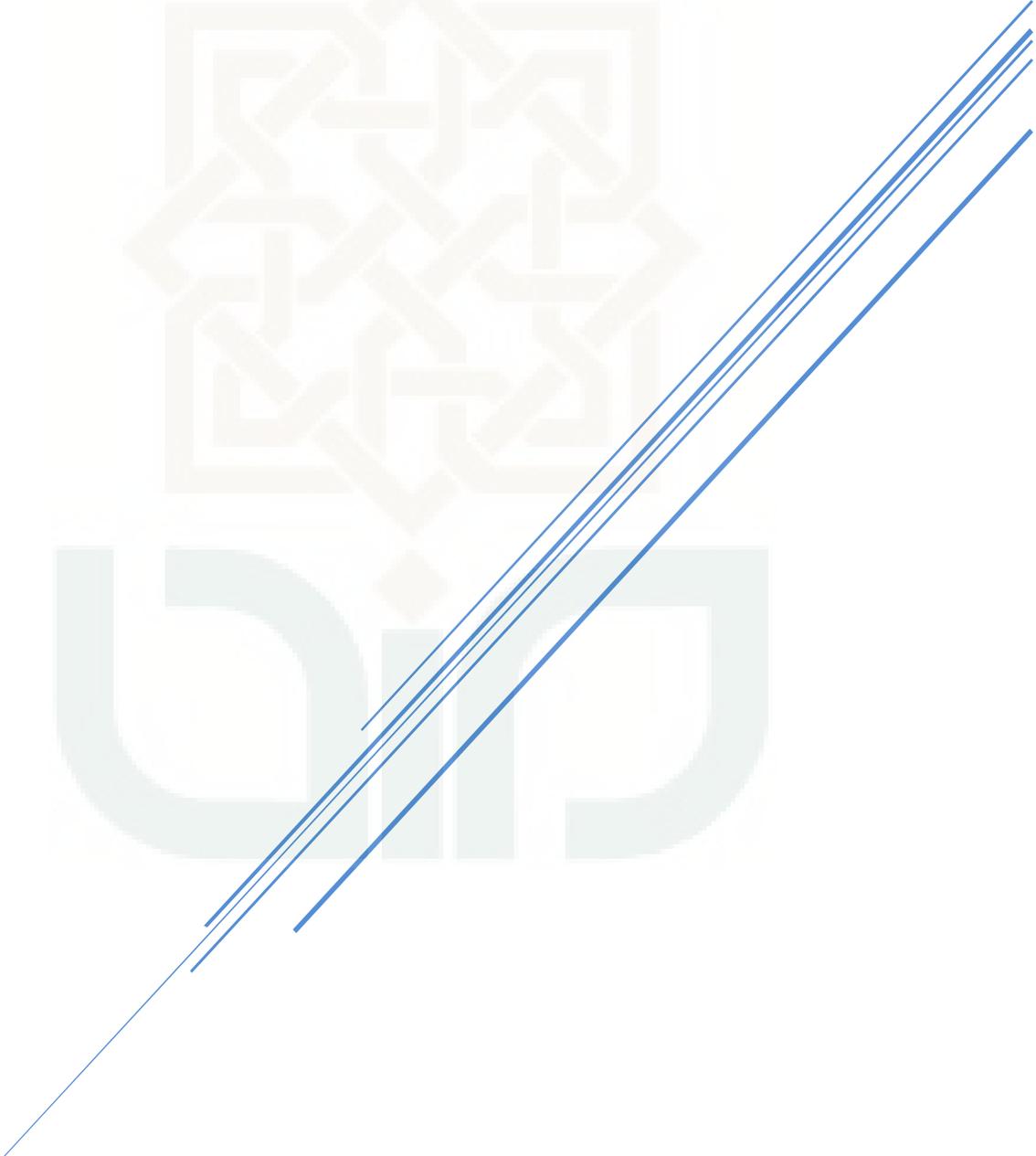
(Lampiran Pengumuman No.: Peng-00301/BEI.OPP/05-2016 tanggal 27 Mei 2016)

No.	Kode	Nama Saham
1.	MPPA	Matahari Putra Prima Tbk.
2.	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.



FREQUENTY ASKED QUESTION

Amnesti Pajak



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

No	Uraian
1.	<p>Siapa saja yang boleh mengikuti Amnesti Pajak?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Setiap WP baik OP maupun Badan yang memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh dapat mengikuti Amnesti Pajak, kecuali WP yang sedang dilakukan penyidikan dan telah P-21, dalam proses peradilan, dan WP yang sedang menjalani hukuman atas pidana di bidang perpajakan. Oleh karena itu, bagi WP yang hanya memiliki kewajiban pajak sebagai Pemotong/Pemungut saja, tidak dapat mengikuti Amnesti Pajak, misalnya WP Bendahara atau WP yang tidak memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Badan seperti WP <i>Joint Operation</i>.</p>
2.	<p>Bagi Orang Pribadi atau Badan yang belum memiliki NPWP, apakah dapat mengikuti Amnesti Pajak?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Orang Pribadi atau Badan harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh NPWP. Setelah memiliki NPWP, Orang Pribadi dan Badan dapat mengikuti Amnesti Pajak.</p>
3.	<p>Bagi Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh NPWP setelah tahun 2015 dan ingin mengikuti Amnesti Pajak, bagaimana perlakuannya?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Bagi Wajib Pajak yang memperoleh NPWP setelah tahun 2015 dan ingin mengikuti Amnesti Pajak, dilakukan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Harta tanpa melampirkan fotokopi SPT PPh Terakhir .</p>
4.	<p>Wajib Pajak sudah jujur melaporkan seluruh penghasilan, hanya saja terdapat beberapa harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015, apakah atas harta yang belum dilaporkan tersebut dapat mengikuti Amnesti Pajak?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Wajib Pajak dapat mengikuti Amnesti Pajak dengan mengungkapkan seluruh Harta yang belum dilaporkan di SPT melalui Surat Pernyataan Harta dan membayar Uang Tebusan dengan jumlah tertentu.</p>
5.	<p>WNI bekerja di luar negeri, memiliki harta di luar negeri dan dalam negeri, memiliki NPWP namun berada dan bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari. WNI tersebut ingin mengikuti Amnesti Pajak, bagaimana caranya? Harta mana saja yang dilaporkan?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Wajib Pajak yang berada dan bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari dan status NPWP-nya non-efektif, dapat mengikuti Amnesti Pajak dengan mengaktifkan kembali NPWP-nya. Harta yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta adalah harta yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.</p>
6.	<p>Kewajiban pajak apa saja yang diampuni?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Kewajiban pajak yang diampuni meliputi kewajiban PPh dan PPN atau PPN dan PPnBM</p>
7.	<p>Bagaimana cara menghitung Uang Tebusan?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Uang Tebusan dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Uang Tebusan.</p>

No	Uraian
	Dasar Pengenaan Uang Tebusan dihitung berdasarkan nilai Harta Bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. Nilai Harta Bersih merupakan selisih antara nilai harta dikurangi nilai utang.
8.	<p>WP melakukan deklarasi dalam negeri, namun sebelum 3 tahun WP tersebut mengalihkan harta ke luar negeri, bagaimana perlakuannya menurut UU Amnesti Pajak?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Ketika WP melakukan deklarasi dalam negeri maka tarif tebusan yang digunakan sesuai dengan ketentuan UU Amnesti Pajak yakni 2%, 3% atau 5% tergantung periode penyampaian Surat Pernyataan. Namun, apabila sebelum 3 tahun WP mengalihkan harta tersebut ke luar negeri maka atas seluruh Harta bersih tambahan yang tercantum dalam Surat Keterangan diperlakukan sebagai penghasilan Tahun Pajak 2016 dan dikenai pajak beserta sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.</p>
9.	<p>Berapa maksimal utang yang dapat menjadi pengurang nilai Harta untuk menentukan nilai Harta bersih?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Utang yang bisa menjadi pengurang nilai harta maksimal adalah 75% dari nilai Harta untuk WP badan dan 50% dari nilai Harta untuk WP OP.</p> <p>Misalnya: PT A memiliki harta yang belum dilaporkan dalam SPT PPh sebesar Rp500 juta yang dibiayai sebagian besar dari utang sebesar Rp400juta. Maka utang yang bisa dikurangkan untuk menghitung nilai Harta bersih maksimal $Rp500 \text{ juta} \times 75\% = Rp375 \text{ juta}$. Jadi nilai Harta bersih sebagai DPP Uang Tebusan adalah $Rp500 \text{ juta} - Rp375 \text{ juta} = Rp125 \text{ juta}$.</p>
10.	<p>Harta siapa yang bisa diklaim? De facto atau de jure? Per kapan?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Amnesti Pajak sifatnya <i>self assessment</i>, sehingga harta yang akan dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta diserahkan kepada WP dan atas harta yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta tersebut tidak perlu dilampiri dokumen pendukung.</p>
11.	<p>Bagaimana kalau asset dalam sengketa, siapa yang berhak mengakui aset tersebut apabila ingin mengikuti Amnesti Pajak?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Amnesti Pajak sifatnya <i>self assessment</i>, sehingga harta yang akan dilaporkan dalam Surat Pernyataan diserahkan kepada WP.</p>
12.	<p>Untuk <i>asset trust</i> apakah perlu dilaporkan?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Sepanjang asset trust tersebut diakui sebagai harta oleh trust yang bersangkutan, dapat dilaporkan sebagai Harta tambahan dalam Surat Pernyataan.</p>
13.	<p>Dalam hal suami-istri memiliki NPWP masing-masing, bagaimana perlakuannya apabila suami-istri tersebut ingin mengikuti Amnesti Pajak?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Dalam hal istri memilih untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sendiri maka pengajuan Amnesti Pajak dilakukan oleh masing-masing.</p>

No	Uraian
14.	<p>Dalam hal suami-istri masing-masing memiliki NPWP dan mempunyai <i>joint-account</i>, bagaimana pelaporannya dalam Amnesti Pajak?</p> <p><u>Jawaban:</u></p> <p>Besaran nilai <i>joint-account</i> untuk masing-masing diserahkan kepada WP dengan melampirkan surat pernyataan.</p>
15.	<p>Kalau suami WNA dan istri WNI bagaimana?</p> <p><u>Jawaban:</u></p> <p>Dalam hal suami merupakan Subjek Pajak Dalam Negeri dan tidak ada perjanjian pisah harta, maka hanya suami yang mengikuti Amnesti Pajak.</p> <p>Dalam hal suami bukan Subjek Pajak Dalam Negeri dan tidak ada perjanjian pisah harta, maka tidak dapat mengikuti Amnesti Pajak.</p>
16.	<p>Bagaimana cara menilai harta tambahan?</p> <p><u>Jawaban:</u></p> <p>Untuk harta berupa kas dinilai berdasarkan nilai nominal</p> <p>Selain kas dinilai berdasarkan nilai wajar</p> <p>Nilai wajar adalah nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan dari asset yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian WP.</p>
17.	<p>Apakah atas setiap Surat Pernyataan pasti diterbitkan Surat Keterangan?</p> <p><u>Jawaban:</u></p> <p>Semua Surat Pernyataan yang disampaikan oleh Wajib Pajak akan diteliti kelengkapan dan kebenarannya sebelum diberikan tanda terima. Dalam hal tanda terima telah diberikan maka akan diterbitkan Surat Keterangan.</p>
18.	<p>Apakah Surat Pernyataan bisa dikuasakan penandatanganannya?</p> <p><u>Jawaban:</u></p> <p>Penandatanganan Surat Pernyataan oleh Kuasa hanya berlaku bagi WP Badan. Sedangkan WP Orang Pribadi, wajib ditandatangani oleh WP langsung.</p>
19.	<p>Apakah untuk penyampaian Surat Pernyataan ke KPP dapat dikuasakan?</p> <p><u>Jawaban:</u></p> <p>Penyampaian Surat Pernyataan bagi WP Badan dan WP OP dapat dikuasakan dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus untuk menyampaikan Surat Pernyataan</p>
20.	<p>Apakah selain surat pernyataan (misal surat komitmen untuk memasukkan harta, surat pernyataan peredaran dll) bisa dikuasakan penandatanganannya?</p> <p><u>Jawaban:</u></p> <p>Perlakuan mengenai penandatanganan Surat selain Surat Pernyataan disamakan dengan ketentuan mengenai Surat Kuasa untuk menandatangani Surat Pernyataan</p>
21.	<p>Apakah surat pernyataan bisa disampaikan via pos?</p> <p><u>Jawaban:</u></p> <p>Tidak bisa, harus disampaikan langsung ke KPP terdaftar (tidak bisa ke KPP selain KPP terdaftar) atau bagi yang di luar negeri hanya bisa ke KBRI Singapura, KBRI London, KJRI Hongkong</p>

No	Uraian
22.	<p>Apabila sedang sengketa PK dan yang mengajukan PK adalah DJP bukan WP, apakah WP bisa ikut TA? Dalam hal bisa, Tunggakan Pajak yang mana yang harus diselesaikan oleh WP? Apakah yang dalam putusan banding?</p> <p>Jawaban:</p> <p>WP Bisa mengikuti TA sepanjang bukan yang dikecualikan oleh UU. DJP akan menarik PK yang diajukan.</p> <p>Posisi pokok pajak pada produk hukum terakhir dianggap sebagai tunggakan pajak yang harus dilunasi terlebih dahulu oleh Wajib Pajak.</p>
23.	<p>Apakah harta berupa saham dapat di repatriasi?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Repatriasi harus berbentuk uang dalam mata uang rupiah. Untuk itu dalam WP memiliki harta dalam bentuk non uang di luar negeri dan hendak melakukan repatriasi, maka harta tersebut harus diubah dalam bentuk uang dan diinvestasikan dalam instrument yang telah ditetapkan.</p>
24.	<p>WP mau mengalihkan uang dari suatu Negara ke Indonesia, Negara tersebut membuat regulasi bahwa tidak memungkinkan uang keluar dari Negara itu. Bagaimana agar WP memperoleh tarif repatriasi?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Apabil WP tidak dapat mengalihkan hartanya yang berada di luar negeri ke dalam negeri, maka WP harus melakukan deklarasi dengan tarif sesuai ketentuan</p>
25.	<p>Tunggakan apa saja yang harus dibayar?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Tunggakan yang harus dibayar hanya atas pokok pajak saja.</p> <p>STP yang hanya atas sanksi administrasi tidak perlu dibayar.</p> <p>Dalam hal tunggakan dalam skp sudah dibayar sebagian, maka penentuan pokok yang belum dibayar menggunakan penghitungan secara proporsional.</p>
26.	<p>Apakah harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan perlu didukung dengan data/dokumen kepemilikan?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Atas Harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan tidak perlu dilampiri bukti pendukung. WP hanya perlu mencatumkan informasi mengenai harta dalam Surat Pernyataan.</p>
27.	<p>Bagaimana bila harta yang diungkap dalam Surat Pernyataan masih atas nama orang lain?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Status kepemilikan Harta diserahkan pada Wajib Pajak dan dalam hal terdapat harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan masih atas nama orang lain, maka Surat Pernyataan hanya perlu dilampiri Surat Pernyataan Nominee.</p>
28.	<p>Apakah atas PPN masukan yang belum di kreditkan dan belum dibiayakan dapat masuk ke Harta tambahan?</p> <p>Jawaban:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal Wajib Pajak belum melaporkan harta yang diperolehnya di dalam SPT PPh Tahun Terakhir, maka Wajib Pajak dapat melaporkan hartanya di dalam Surat Pernyataan sesuai

No	Uraian
	<p>dengan nilai wajar (dengan dapat memperhitungkan PPN masukan yang belum di kreditkan atau dibiayakan)</p> <p>2. Dalam hal Wajib Pajak sudah pernah melaporkan harta yang dimaksud di dalam SPT Tahunan, maka PPN masukan atas harta tersebut tidak dapat menjadi dasar pengenaan uang tebusan</p>
29.	<p>Apakah yang dimaksud dengan nilai wajar aset yang dilaporkan dalam Harta tambahan</p> <p>Jawaban: Nilai wajar adalah nilai menurut Wajib Pajak sendiri yang menggambarkan kondisi aset sejenis pada akhir Tahun Pajak Terakhir.</p>
30.	<p>Dokumen pendukung apa yang digunakan untuk membuktikan utang kepada individu?</p> <p>Jawaban: Wajib Pajak harus melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. surat pengakuan utang antara Wajib Pajak dan pihak pemberi pinjaman di hadapan notaris, atau 2. surat pernyataan bermaterai yang ditanda tangani Wajib Pajak, pihak pemberi pinjaman dan saksi <p>Utang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kebenaran dan keberadaannya dan digunakan langsung untuk memperoleh Harta tambahan.</p>
31.	<p>Apakah formulir surat pernyataan WP sudah tersedia?</p> <p>Jawaban Formulir terkait pelaksanaan program amnesti pajak dapat diunduh di http://www.pajak.go.id/amnestipajak#download</p>
32.	<p>Ada ada sanksi administrasi bagi WP yg tidak ikut amnesti pajak dan ditemukan datanya?</p> <p>Jawaban: Ya. Dalam hal WP tidak mengikuti amnesti pajak dan ditemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 yang belum dilaporkan dalam SPT Penghasilan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan pada saat ditemukannya data dan/atau informasi tersebut dan dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.</p>
33.	<p>WP sudah punya NPWP sebelum 2015 dan belum pernah menyampaikan SPT sekalipun. WP berniat ikut Amnesti Pajak, namun hendak mengungkapkan semua harta yang dimilikinya pada SPT Terakhir (2015), sehingga tidak ada lagi harta bersih yang akan diungkapkan di Surat Pernyataannya. Bagaimana perlakuannya?</p> <p>Jawaban: Harta yang diungkapkan oleh WP tersebut dalam SPT PPh Terakhir adalah hanya Harta yang bersumber dari penghasilan pada Tahun Pajak Terakhir.</p>
34.	<p>Untuk nilai Harta yang berupa non kas, apakah menggunakan nilai historis atau nilai wajar?</p> <p>Jawaban: Untuk Harta selain kas dihitung berdasarkan nilai wajar harta pada akhir tahun pajak terakhir.</p>

No	Uraian
35.	<p>Dalam hal Tanggal Utang berbeda jauh dengan tanggal perolehan harta, apakah fiskus dapat menolak utang tersebut dimasukkan di dalam surat pernyataan?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Utang yang berkaitan dengan Harta tambahan adalah Utang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kebenaran dan keberadaannya yang digunakan langsung untuk memperoleh Harta tambahan tersebut.</p>
36.	<p>Apakah Karyawan atau dokter apakah bisa menggunakan tarif umkm?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Yang dapat memanfaatkan tarif Pasal 4 ayat (3) dalam UU Pengampunan Pajak adalah Wajib Pajak yang memiliki peredaran usaha hanya bersumber dari penghasilan atas kegiatan usaha s.d Rp4.8 miliar pada Tahun Pajak terakhir dan tidak menerima penghasilan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan / atau pekerjaan bebas.</p> <p>Dengan demikian karyawan, dokter harus menggunakan tarif Pasal 4 ayat (1) UU amnesti pajak yaitu 2%, 3%, atau 5% tergantung masa penyampaian Surat Pernyataan.</p>
37.	<p>Jika WP tidak ada upaya hukum yang sedang dilakukan apakah harus melampirkan surat pernyataan mencabut juga sebagai syarat dalam menyampaikan Surat Pernyataan?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Wajib Pajak tidak perlu melampirkan surat pernyataan mencabut upaya hukum jika tidak sedang mengajukan upaya hukum.</p>
38.	<p>Apakah yang dimaksud dengan Harta yang belum seluruhnya dilaporkan. Apakah selisih nilai harta yang telah dilaporkan dalam SPT, boleh dinyatakan dalam Surat Pernyataan untuk mengajukan Amnesti Pajak?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Pengertian Harta yang belum seluruhnya dilaporkan adalah apabila terdapat Harta yang belum diungkap dalam SPT yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak. Pada prinsipnya hanya Harta tambahan baru yang boleh diungkapkan dalam Surat Pernyataan sedangkan selisih nilai dapat diajukan revaluasi aset melalui KPP tempat Wajib Pajak diadministrasikan</p>
39.	<p>Apakah harta yang sudah dilaporkan di SPT dikarenakan perubahan nilai pasar boleh diikutkan Amnesti Pajak?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Hanya Harta tambahan baru yang dapat diikutkan dalam program ini sedangkan untuk perubahan nilai pasar dapat diajukan revaluasi aktiva tetap melalui KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.</p>
40.	<p>Apakah penambahan tabungan di SPT 2015 dengan kondisi rekening Desember 2015, termasuk dalam objek Amnesti Pajak?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Penambahan tabungan yang tidak dilaporkan dalam SPT 2015 yang telah dilaporkan ke KPP sebelum tgl 1 Juli 2016 merupakan Harta tambahan yang menjadi Dasar Pengenaan Uang Tebusan.</p>

No	Uraian
41.	<p>Deposito Dalam Negeri dalam bentuk valas sudah dilaporkan di SPT 2015 sesuai kondisi Desember 2015, apakah boleh ikut TA? Apakah selisih kurs akibat dampak perbedaan kurs merupakan Harta tambahan yang menjadi objek Pengampunan Pajak?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Dalam hal tidak terdapat penambahan dalam deposito valas tersebut, maka tidak ada Harta tambahan atas deposito sebagai objek Amnesti Pajak.</p> <p>Dalam Ketentuan Pengampunan Pajak diatur dalam hal terdapat Harta tambahan yang menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai Harta tambahan ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir.</p>
42.	<p>Bagaimana perlakuan atas kenaikan harga tanah yang atas tanah tersebut pernah dilaporkan sebelumnya dalam SPT Tahunan PPh, walaupun tidak ada penambahan aset atas tanah tersebut.</p> <p>Jawaban:</p> <p>Kenaikan nilai tanah yang hanya diakibatkan kenaikan harga tanah per meter dan bukan diakibatkan penambahan Harta atas tanah tersebut, bukan merupakan objek pajak Amnesti Pajak.</p>
43.	<p>Wajib Pajak membangun tempat usaha (bangunan baru) diatas tanah kosong yang ada bangunan lamanya. Wajib Pajak pernah melaporkan kepemilikan tanah dalam SPT Tahunan PPh. Apakah atas bangunan baru perlu di laporkan dalam Surat Pernyataan?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Atas bangunan baru dan bangunan lama yang belum dilaporkan tersebut merupakan objek Amnesti Pajak yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta</p>
44.	<p>Wajib Pajak melakukan penambahan kapasitas gudang dengan cara memperluas gudang dari sebelumnya 300 meter menjadi 1000 meter di tahun 2014. Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan di tahun 2012 dengan mencantumkan gudang tersebut (300 meter). Wajib Pajak belum pernah menyampaikan SPT Tahunan sejak 2013. Bagaimana perlakuan Amnesti Pajak atas harta tersebut?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Atas tambahan berupa gudang yang lebih luas merupaka objek Amnesti Pajak yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta. Objek Amnesti Pajaknya sebesar nilai wajar dari perluasan bangunan yang dilakukan pada akhir Tahun Pajak SPT Terakhir.</p>
45.	<p>Pengusaha memiliki omset s.d. 4,8 Milyar dan mempunyai harta di luar negeri yang tidak dilakukan repatriasi (WP memilih untuk deklarasi luar negeri). Tarif mana yang dikenakan atas harta yang akan menjadi objek Amnesti Pajak.</p> <p>Jawaban:</p> <p>Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 yang hanya bersumber dari penghasilan atas kegiatan usaha dan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan/ atau pekerjaan bebas berhak mendapatkan tarif khusus (2% atau 0,5%) sebagaimana dimaksud Pasal 4 (3) UU Pengampunan Pajak. Tarif tersebut berlaku bagi seluruh Harta Tambahan Wajib Pajak yang bersangkutan.</p>

No	Uraian
46.	<p>Wajib Pajak terakhir menyampaikan SPT Tahunan PPh di Tahun Pajak 2010, kemudian berniat mengikuti Amnesti Pajak. Berapa nilai harta yang harus dicantumkan dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2015 dan Surat Pernyataan?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Nilai harta yang dicantumkan dalam SPT Tahun Pajak 2015 adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> nilai Harta sebagaimana tercantum dalam SPT Tahun Pajak 2010 ditambah dengan Nilai Harta yang bersumber dari penghasilan Tahun Pajak 2015. <p>Atas harta selain a dan b dicantumkan sebagai Harta Tambahan dalam Surat Pernyataan.</p>
47.	<p>Harta yang diperoleh sejak kapan yang bisa diikutkan Amnesti Pajak?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Sepanjang Harta belum dilaporkan sampai dengan Tahun Pajak Terakhir, maka Harta tersebut boleh diajukan sebagai objek Amnesti Pajak.</p>
48.	<p>Apakah Harta bersama atas Wajib Pajak suami istri yang memilih melakukan pisah harta dapat diikutkan dalam Amnesti Pajak?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Harta bersama dapat diikutkan dalam program Amnesti Pajak oleh masing masing Wajib Pajak (suami dan istri) sesuai dengan proporsi kepemilikan yang dimiliki atau kesepakatan kedua belah pihak atas pengakuan harta tersebut.</p>
49.	<p>Apa yang dimaksud dengan Surat Pengakuan Kepemilikan Harta dan Surat Pengakuan Nominee</p> <p>Jawaban:</p> <p>Surat Pengakuan Kepemilikan Harta adalah surat pengakuan bahwa Wajib Pajak yang memiliki Harta yang di atasnamakan nama orang lain, sedangkan Surat Pengakuan Nominee adalah surat pengakuan dari pihak yang di atasnamakan dalam harta berupa saham, tanah, dan/atau bangunan yang tercantum dalam SURAT PENGAKUAN KEPEMILIKAN HARTA.</p>
50.	<p>Apakah atas harta yang dimiliki namun masih atas nama orang lain harus diganti namanya untuk dilaporkan surat dalam pernyataan harta?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Wajib Pajak tidak perlu langsung membalik nama atas harta tersebut namun cukup menyampaikan surat pengakuan nominee dan surat pengakuan kepemilikan oleh pihak lainnya pada saat menyampaikan Surat Pernyataan.</p>
51.	<p>Bagaimana menilai harga rumah yang mau diikutkan program Amnesti Pajak?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Nilai Rumah tersebut dihitung berdasarkan nilai wajar sesuai dengan perhitungan Wajib Pajak.</p>
52.	<p>Apakah atas Harta berupa tanah yang disertakan dalam program Amnesti Pajak pada saat akan dibaliknamakan dihadapan notaris memerlukan SKB?</p> <p>Jawaban:</p> <p>SKB diperlukan sebagai syarat pembebasan PPh Final atas pengalihan Tanah dan/atau bangunan yang telah mendapat Surat Keterangan, sepanjang pengalihan tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2017.</p>

No	Uraian
53.	<p>Apakah harta yang bersumber dari penghasilan Luar Negeri menjadi objek amnesti pajak juga?</p> <p>Jawaban: Wajib Pajak dapat mengungkapkan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh, termasuk harta yang berasal dari penghasilan luar negeri.</p>
54.	<p>Apakah investasi dalam program asuransi kesehatan dapat menjadi objek Amnesti Pajak? Berapa nilai yang harus diungkapkan? Apakah sebesar investasi yang akan diterima di masa depan atau nilai premi yang sudah dibayar?</p> <p>Jawaban: Investasi dalam bentuk asuransi kesehatan yang berbentuk unit link merupakan harta dalam bentuk non cash. Untuk itu, pengungkapan nilainya sebesar nilai wajar atas investasi dalam program tersebut.</p>
55.	<p>Apakah terdapat fasilitas pembebasan BPHTB untuk kewajiban balik nama atas Harta dalam bentuk Tanah dan/atau Bangunan yang dilakukan sampai dengan Desember 2017?</p> <p>Jawaban: BPHTB tidak termasuk fasilitas yang dibebaskan dalam UU Pengampunan Pajak</p>
56.	<p>Apabila WP tidak berkenan dengan skema Pasal 18 PMK 118 Tahun 2016 (ketentuan mengenai penyampaian SPT Tahunan PPh terakhir), apakah WP boleh membetulkan SPT PPh Tahun 2011 sd 2014?</p> <p>Jawaban: Pembetulan SPT merupakan hak Wajib Pajak, namun apabila SPT Tahun Pajak 2015 disampaikan setelah tanggal 1 Juli 2016 dan Wajib Pajak mengikuti program amnesti pajak ini maka Pasal 18 PMK 118 berlaku.</p>
57.	<p>Apakah pembetulan SPT PPh 2015 yang dilakukan sebelum berlakunya UU Pengampunan pajak atas harta yang dilaporkan dalam SPT tersebut dapat diperhitungkan dalam Surat Pernyataan?</p> <p>Jawaban: SPT Pembetulan yang dilaporkan ke KPP sebelum tanggal 1 Juli 2016 adalah SPT yang sah sehingga nilai Harta bersih yang telah dilaporkan dalam SPT pembetulan tersebut, dapat diperhitungkan dalam pengungkapan Harta pada Surat Pernyataan.</p>
58.	<p>Wajib Pajak memiliki Harta berupa rumah yang diperoleh pada tahun 2000 sebesar 1 Miliar yang kini nilai pasarnya adalah sebesar 3M. Atas Harta tersebut belum pernah dilaporkan dalam SPT. Bagaimana Wajib Pajak harus melaporkannya?</p> <p>Jawaban: Dalam UU Pengampunan Pajak, untuk Harta tambahan selain kas dinilai sebesar nilai wajarnya.</p>
59.	<p>Apakah penyampaian Surat Pernyataan dapat dikuasakan?</p> <p>Jawaban: Penyampaian Permohonan dalam program Amnesti Pajak dapat dikuasakan dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan perdata.</p>
60.	<p>Apakah penandatanganan surat permohonan orang pribadi dapat diwakilkan?</p> <p>Jawaban: Penandatanganan Surat Pernyataan harus dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi sendiri.</p>

No	Uraian
61.	<p>Apakah permintaan data (misalnya tunggakan Pajak) untuk keperluan amnesti pajak dapat diwakilkan?</p> <p>Jawaban: Permintaan data dapat diwakilkan dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus</p>
62.	<p>Apakah nilai 4,8M hanya berlaku untuk Wajib Pajak OP saja atau berlaku juga untuk WP Badan?</p> <p>Jawaban: Yang dapat memanfaatkan tarif Pasal 4 ayat (3) dalam UU Pengampunan Pajak adalah Wajib Pajak, baik Orang Pribadi atau Badan, sepanjang memiliki peredaran usaha hanya bersumber dari penghasilan atas kegiatan usaha s.d Rp4.8 miliar pada Tahun Pajak terakhir dan tidak menerima penghasilan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan / atau pekerjaan bebas.</p>
63.	<p>Apabila harta telah dilaporkan dalam SPT, apakah dapat dilaporkan lagi dalam Amnesti Pajak?</p> <p>Jawaban: Harta yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan hanya harta yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT.</p>
64.	<p>Apakah persediaan dalam Surat Pernyataan harus dirinci?</p> <p>Jawaban: Pengungkapan Harta dalam Surat Pernyataan harus dirinci sesuai dengan isian dalam lampiran Surat Pernyataan.</p>
65.	<p>Atas Warisan orang tua kepada anak yang belum pernah dilaporkan dalam SPT Tahunan, siapa yang berhak mengajukan Amnesti Pajak?</p> <p>Jawaban: Dalam hal Warisan tersebut belum terbagi, maka atas harta Warisan tersebut dapat diikutkan dalam program Amnesti Pajak dengan menggunakan Subjek Pajak Warisan Yang Belum terbagi sebagai Subjek Pajak menggantikan yang berhak. Pelaksananya dilakukan oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta warisan tersebut (Keterangan: NPWP Subjek Pajak Warisan Yang Belum terbagi adalah sama dengan NPWP Almarhum. Dalam hal Warisan sudah terbagi, maka yang mengajukan amnesti pajak adalah masing-masing ahli waris yang mendapatkan harta berupa warisan tersebut.</p>
66.	<p>Apakah untuk melakukan repatriasi harta dari luar negeri harus dilakukan dalam bentuk cash?</p> <p>Jawaban: Harta yang akan dilakukan repatriasi harus dalam bentuk cash, dengan demikian atas bentuk non kas yang ada di luar negeri harus dialihkan dan atas uang hasil pengalihan harus diinvestasikan sesuai ketentuan di dalam UU Pengampunan Pajak. Sebagai contoh Wajib Pajak memiliki apartemen di Singapura dan ingin mengikuti program Amnesti Pajak dan memanfaatkan tarif repatriasi. Untuk itu Wajib Pajak dapat menjual apartemen tersebut hasil penjualannya dimasukan kedalam rekening khusus pada Bank Persepsi di dalam negeri.</p>
67.	<p>Jika WP Orang Pribadi mengalami sakit stroke, apakah Surat Pernyataan boleh dikuasakan? Bolehkah diganti dengan cap jempol?</p>

No	Uraian
	<p><u>Jawaban:</u> Dalam hal keadaan khusus, tanda tangan dapat diganti dengan bentuk yang lain yang sah secara hukum, dalam rangka memberikan hak yang sama kepada semua Wajib Pajak</p>
68.	<p>Apabila di tahun 2016 Wajib Pajak tidak mengikuti Amnesti Pajak, dan berniat mengikuti amnesti pajak pada periode ketiga amnesti pajak (1 Januari – 31 Maret 2017), apakah SPT Tahun Pajak Terakhirnya menggunakan SPT 2015 atau 2016?</p> <p><u>Jawaban:</u> SPT Tahun Pajak 2015</p>
69.	<p>Berapa Utang yang dapat diakui dalam penghitungan Uang Tebusan?</p> <p><u>Jawaban:</u> Untuk penghitungan Uang Tebusan, nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai Harta tambahan :</p> <p>a. Bagi WP badan paling banyak 75% dari nilai Harta tambahan; b. Bagi WP OP paling banyak 50% dari nilai Harta tambahan.</p>
70.	<p>Apakah nilai 10 miliar sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) UU Pengampunan Pajak bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya kurang dari 4,8 miliar merupakan nilai harta keseluruhan atau nilai Harta tambahan yang belum pernah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh?</p> <p><u>Jawaban:</u> Nilai 10 miliar dalam Pasal 4 (3) UU Pengampunan Pajak merupakan nilai keseluruhan Harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, yang terdiri dari:</p> <p>a. Harta yang sudah diungkapkan dalam SPT PPh Terakhir; dan b. Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir</p>
71.	<p>Bagaimana WP membuktikan pokok utang atas utang yang diberikan dari sesama Wajib Pajak orang pribadi</p> <p><u>Jawaban:</u> Wajib Pajak perlu membuat surat pernyataan yang sah mengenai pengakuan utang oleh kedua belah pihak.</p>
72.	<p>Apakah kewajiban PPh, PPN, dan PPN atau PPn BM dihapuskan bagi Wajib Pajak yang mengikuti program amnesti pajak?</p> <p><u>Jawaban:</u> Bagi Wajib Pajak yang mengikuti program amnesti pajak dan telah mendapatkan Surat Keterangan, maka dihapus pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana dibidang perpajakan atas kewajiban PPh, PPN, dan/atau PPn BM untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, Tahun Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir.</p>
73.	<p>WP berniat mengikuti amnesti pajak, namun atas harta tersebut akan dijual 2 bulan lagi. Bagaimana perlakuan pajak atas harta tersebut</p> <p><u>Jawaban:</u> Dalam harta tersebut diungkapkan dalam Surat Pernyataan dalam skema deklarasi dalam negeri atau repatriasi, maka harta tersebut tidak boleh dialihkan ke luar negeri selama tiga tahun. Dengan demikian harta tersebut boleh dijual, namun hasil penjualannya tidak dialihkan ke luar negeri.</p>

No	Uraian
74.	<p>WP Orang Pribadi membeli apartemen dengan cara mencicil ke perusahaan. Apakah atas harta tersebut dapat diajukan amnesti pajak.</p> <p>Jawaban:</p> <p>Apartemen tersebut dapat diikutsertakan dalam program Amnesti Pajak sepanjang belum dilaporkan dalam SPT PPh.</p>
75.	<p>WP X melaporkan SPT tahun 2011 sampai dengan 2015 setelah UU amnesti pajak berlaku tanpa berniat ikut Amnesti Pajak. Setelah penyampaian SPT tersebut, Wajib Pajak berniat ikut TA. Terdapat kemungkinan Wajib Pajak berniat mengecilkan uang tebusan karena harta tambahan yang diikutkan amnesti pajak menjadi kecil. Apakah atas SPT Tahunan PPh Tahun 2011 sampai dengan 2015 tersebut diakui?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Pada saat Wajib Pajak mengikuti program Amnesti Pajak, SPT PPh yang diakui adalah hanya SPT PPh Terakhir sesuai ketentuan Pasal 18 PMK Nomor 118/PMK.03 Tahun 2016. Harta yang berasal diluar penghasilan Tahun Pajak 2015 diakui sebagai Harta Tambahan yang harus diungkapkan dalam Surat Pernyataan. SPT Tahunan Tahun 2015 yang telah disampaikan tidak perlu diperbaiki.</p>
76.	<p>Bagaimana perlakuan Wajib Pajak jika ingin mengikuti program amnesti pajak namun sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan.</p> <p>Jawaban:</p> <p>WP yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan harus meminta perhitungan pokok pajak terutang ke unit pelaksana pemeriksaan.</p> <p>Berdasarkan perhitungan pokok pajak terutang dari unit pelaksana pemeriksaan bukti permulaan, Wajib Pajak harus melunasi paling lambat 14 hari setelah diterimanya perhitungan tersebut. Setelah WP melunasi pokok pajak terutang, WP pajak dapat mengikuti program Amnesti Pajak.</p>
77.	<p>Apakah Harta yang tidak ada dokumen pendukungnya dapat diajukan sebagai objek amnesti pajak? Bagaimana dengan utang?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan harus terdapat dokumen pendukung, namun tidak perlu dilampirkan dalam surat pernyataan. Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai dokumen pendukung tersebut, Wajib Pajak perlu membuat Surat Pernyataan mengenai Kepemilikan Harta tersebut.</p> <p>Harta yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan menjadi nilai perolehan dalam SPT Tahun berikutnya. Pengujian mengenai eksistensi/keberadaan harta (bukan pengujian nilai harta) dapat dilakukan setelah Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahun Pajak 2016 atau 2017</p> <p>Untuk utang harus dilampiri dengan dokumen pendukung antara lain akad kredit dan surat pengakuan Utang antara dua pihak di hadapan notaris atau di hadapan saksi</p>
78.	<p>Bagaimana perlakuan tanah yang dimiliki Wajib Pajak namun masih atas nama nenek yang sudah meninggal?</p>

No	Uraian
	<p><u>Jawaban:</u> Atas tanah tersebut dapat diikut sertakan dalam program amnesti pajak sepanjang tanah tersebut merupakan milik Wajib Pajak. Tanah harus dibaliknamakan sebelum 31 Desember 2017 jika WP ingin mendapat fasilitas pembebasan PPh atas pengalihan tanah.</p>
79.	<p>Bagaimana format surat pengakuan kepemilikan harta dan surat pengakuan nominee? <u>Jawaban:</u> Undang-undang Pengampunan Pajak dan aturan pelaksanaannya tidak mengatur secara khusus format surat pengakuan kepemilikan harta dan surat pengakuan nominee.</p>
80.	<p>Apakah harta yang masih atas nama WP Orang Pribadi harus dibaliknamakan apabila yang akan mengajukan Amnesti Pajak adalah WP Badan? <u>Jawaban:</u> Pihak yang mengajukan program Amnesti Pajak yang mengungkapkan harta miliknya namun masih atas nama pihak lain, pada saat pengajuan Surat Pernyataan perlu melampirkan Surat Pengakuan Nominee dan Surat Pengakuan Kepemilikan Harta.</p>
81.	<p>Apakah uang tebusan dapat dicicil? <u>Jawaban:</u> Pembayaran Uang Tebusan dapat dicicil. Namun pada pada saat penyampaian Surat Pernyataan, Uang Tebusan sudah harus lunas. Jika belum lunas, Surat Pernyataan tidak dapat diterima.</p>
82.	<p>Wajib Pajak sudah menyampaikan Surat Pernyataan yang pertama. Kemudian, peneliti memiliki data tentang harta yang belum disampaikan dalam surat pernyataan apa yang harus dilakukan? <u>Jawaban:</u> Peneliti dapat melakukan klarifikasi secara persuasif ke Wajib Pajak untuk mengajukan Surat Pernyataan lagi sebelum jangka waktunya berakhir.</p>
83.	<p>1. Apakah ada kriteria tertentu yang mewajibkan WP untuk menggunakan softcopy? 2. Apakah Wajib Pajak boleh mengajukan permohonan secara manual (tidak menyertakan softcopy) atau wajib dengan softcopy? <u>Jawaban:</u> Setiap Wajib Pajak yang mengikuti program Amnesti Pajak wajib menyertakan Daftar rincian Harta dan daftar rincian Utang dalam bentuk softcopy dan hardcopy</p>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Dwi Rahayu, S.E.I.
TTL : Arga Makmur, 12 Juli 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Wonocatur 258A RT 02 RW 23 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Menikah
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Hobi : Organisasi
IPK : 3,54
No Hp : 0856 4343 8556
e-Mail : metamorcookies@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

No	Asal Sekolah	Kota	Tahun
1	TK Raudhatul Athfal	Bengkulu Utara	1993-1995
2	SDN 24 Bengkulu Utara	Bengkulu Utara	1995-2001
3	SMPN 1 Bengkulu Utara	Bengkulu Utara	2001-2004
4	SMAN 1 Bengkulu Utara	Bengkulu Utara	2004-2007
5	S1 Keuangan Islam Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Kalijaga	Yogyakarta	2007-2011
6	S2 Keuangan & Perbankan Syariah UIN Sunan Kalijaga	Yogyakarta	2013-2016

2. Pendidikan Non-Formal

1	Pelatihan Tekhnis HAKI bagi UKM dan Koperasi di DIY	Peserta	Dekopinwil DIY	2007
2	<i>Co-op Voulenteer Training</i> "Menciptakan KaderMuda Professional"	Panitia	Koperasi Pemuda Indonesia	2008
3	Seminar Nasional Ekonomi Islam "Rekonstruksi Strategi dalam	Peserta	Forum Studi Ekonomi Islam	2008

	Proses Akselerasi Perbankan Syari'ah			
4	<i>Training for Succesfull Trainer (TFST) IV se DIY-JATENG</i>	Peserta	Kopma UIN Sunan Kalijaga	2008
5	Kuliah umum perkembangan Pasar Modal Syari'ah di Indonesia	Peserta	BAPEPAM-LK dan Prodi KUI	2010
6	<i>Shell LiveWIRE Bright Ideas Workshop</i>	Peserta	Kementrian Koperasi dan UKM RI	2010
7	<i>Pelatihan Manajemen Koperasi Siswa</i>	Pembicara	KKN-PPL UNY	2010
8	<i>Shell LiveWIRE Becoming Succesful Owner Manager Workshop</i>	Peserta	Kementrian Koperasi dan UKM RI	2010
9	<i>Communication & Interpersonal Skill Training</i>	Peserta	UIN & Farahdi Center	2010
10	<i>Pelatihan Pengisian SPT</i>	Peserta	UIN & Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Yogyakarta	2011
11	<i>Islamic Banking Training</i>	Peserta	BEM-F Syariah & Hukum	2011

C. Riwayat Pekerjaan

No	Sebagai	Tempat	Tahun
1	- Staff. Pengembangan Sumber Daya Anggota - Kabid. Pengembangan Sumber Daya Anggota - Ketua Pengawas	Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2007-2011
2	Staf Operasional	Disperindagkop DIY	2009-2011
3	Staf Operasional	DEKOPIN DIY	2010-2012
4	Magang	BTN Syariah Cab. Yogyakarta	2011
5	<i>Freelance</i>	BRI Syariah Cab. Yogyakarta	2011
6	<i>Freelance</i>	BSM KCP Katamso	2011
7	Customer Service	XL Center Yogyakarta	2012
8	Manajer Keuangan	PT. Cakrawala Metrik	2014-2015